

**PERAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI DESA MAGUWO HARJO
KECAMATAN DE[POK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fkultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunsn Kalijaga Yogyakarta Guna
Memenuhi Sebaian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial Islam**

**Oleh:
ADE ZULKHAN SUPARMAN
00230248**

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
2007**

Abstrak

Perkembangan zaman menyebabkan perubahan disegala bidang, salah satunya adalah berkembangnya kebutuhan masyarakat, disisi lain perkembangan zaman memberikan dampak positif bagi perkembangan kreatifitas antar individu untuk bersaing dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun dampak tersebut menyisakan problem sosial, yaitu terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Diantaranya muncul kelompok marginal, yang secara sosial melahirkan kemiskinan.

Kemiskinan secara sosial dipahami sebagai kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok; sandang, papan, pangan, dan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan keinginan berinteraksi dengan sesame anggota masyarakat tanpa dibatasi dengan kelas-kelas sosial.

Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi manusia, yang sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan implikasinya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, tetapi sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kemiskinan adalah suatu hal yang nyata adanya bagi mereka yang tergolong miskin. Mereka itu sendiri yang merasakan dan menjalani kehidupan dalam kemiskinan tersebut. Kemiskinan itu akan lebih terasa lagi apabila mereka membandingkannya dengan kehidupan orang yang lebih tinggi tingkat kehidupannya.

Dalam penelitian ini membahas sebuah lembaga keuangan mikro yang bernama BUKP (Badan Usaha Kredit Pedesaan). BUKP adalah sebuah lembaga keuangan mikro milik pemerintah yang berupaya mengembangkan perekonomian dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat golongan ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya melalui pemberian kredit untuk permodalan usaha.

BUKP dalam usahanya mengentaskan kemiskinan di Desa Maguwoharjo difokuskan pada beberapa aspek yaitu pemberian kredit, penghimpunan dana berupa tabungan dan pendampingan yang berupa konsultasi kewiariausahaan. Dalam penelitian ini diketahui perubahan yang dialami masyarakat miskin di desa Maguwoharjo yaitu peningkatan pengelolaan usaha dan peningkatan pendapatan.

Pajar Hatma Indra Jaya M. Si.
Dosen Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp : 5 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Ade Zulkhan Suparman
NIM : 00230248
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : **PERAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DALAM
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI DESA
MAGUWO HARJO KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut diatas telah dapat dimunaqosahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater, agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Oktober 2007
Pembimbing


Pajar Hatma Indra Jaya M. Si.
NIP. 130 327 067



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telpun (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN

Nomor : UIN/02/DD/PP.00.9/76/2008

Judul Skripsi:

**PERAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI DESA MAGUWO HARJO
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Ade Zulkhan Suparman
NIM. 00230248

Telah dimunaqosyahkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 November 2007

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Dra. Siti Fatmahan, M.Pd.
NIP. 150267223

Sekretaris Sidang

Nailul Falah, S.Ag., M.Si.
NIP. 150288307

Pembimbing

Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
NIP. 150327067

Penguji I

Suyanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 150233520

Penguji II

Drs. Mokh. Nazli, M.Pd.
NIP. 150246398

Yogyakarta, 17 Januari 2008
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah
Dekan

Drs. H. Afif Rifai, MS
NIP. 150222293



MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Al-Insyirah: 6)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bapak dan ibu tercinta yang telah dengan sabar mendidik, mengasuh dan menyayangi hingga putramu mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun

“terlambat”

“Maafkan putramu ini”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Lembut atas selesainya skripsi ini. Penyusun yakin bahwa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, serta dorongan dari berbagai pihak yang telah berkenan memberikan bantuan, fasilitas, kemudahan, semangat dan doa restu kepada penyusun, skripsi ini dapat selesai.

Fitrah bagi manusia bahwa dalam segala aktifitas senantiasa membutuhkan keterlibatan dari pihak lain, begitupun dengan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penyusun ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain:

1. Drs. H. Afif Rif'ai M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Aziz Muslim M.Pd, selaku Kepala Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Abu Suhud, M.Pd, selaku Pembimbing Akademik Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bpk Pajar Hatma Indra Jaya. M.Si, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Semua Dosen PMI yang telah berkenan menularkan ilmu dan pengetahuannya hingga masa akhir studi.
6. Bpk Muhammad Asyhari selaku ketua BUKP kecamatan Depok beserta jajarannya.

7. Bapak, ibu, kakak-kakak dan adikku tercinta (Mas Agus, Mba Novi, Mas Juni, Dek Fajar), keponakanku Zizou, serta paman dan bibi (bpk Taryo dan bu Dirman) yang selalu memberikan dukungan moril, motivasi dan doa.
8. Teman-teman PMI-A dan PMI-B yang telah mewarnai hari-hariku dikampus.
9. Keluarga besar Gita Savana, terima kasih untuk kehangatan yang telah kalian berikan.
10. Keluarga besar TPA Baiturrahim Nologaten, terima kasih untuk semangat yang telah kalian suguhkan.
11. Teman-teman kos 'Firdaus' (Hamdan, Hadi, Damai, Kartolo, Djoko, Aray, Kempong, Amin, Ulil), makasih atas keceriaan yang telah kalian hadirkan.
12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT akan memberikan balasan yang lebih baik atas segala amal baiknya amin. Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 31 Oktober 2007

Penyusun

Ade Zulkhan Suparman
00230248

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
1. Tinjauan Tentang Peranan.....	10
2. Tinjauan Tentang Kemiskinan.....	12
3. Dimensi-dimensi Kemiskinan.....	17
4. Batasan Kemiskinan.....	19

5. Tinjauan Tentang Pengentasan Kemiskinan.....	21
6. Islam dan Kemiskinan.....	29
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Subyek Penelitian.....	36
3. Obyek Penelitian.....	37
4. Metode Penarikan Sample.....	37
5. Metode Pengumpulan Data.....	37
6. Metode Pemeriksaan Data.....	39
7. Metode Analisa Data.....	39

BAB II. GAMBARAN UMUM BUKP DAN DESA MAGUWOHARJO

A. GAMBARAN UMUM BUKP.....	41
1. Sejarah Berdirinya BUKP.....	41
2. Maksud dan Tujuan.....	44
3. Struktur Organisasi.....	45
4. Jenis Kegiatan BUKP	47
5. Administrasi Pembukuan dan Laporan	49
6. Keadaan Karyawan dan Nasabah	50
7. Sosialisasi	55
B. GAMBARAN UMUM DESA MAGUWOHARJO.....	57

BAB III. PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN OLEH BUKP

DI DESA MAGUWO HARJO

A. Pendanaan BUKP.....	59
1. Pemerintah.....	59
2. Swadaya.....	59
B. Peran BUKP dalam Mengentaskan Kemiskinan.....	65
1. Memberikan Pemodalan dalam Bentuk Kredit.....	65
2. Konsultasi atau Pendampingan.....	73
C. Analisis Terhadap Para Nasabah.....	79
D. Profil Nasabah sukses.....	81

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

DAFTAR LAMPIRAN

- Peta Desa Maguwoharjo
- Daftar Interview Guide
- Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
- Sertifikat Praktikum Dakwah
- Surat Keterangan/Ijin Penelitian dari BAPEDA Propinsi DIY
- Surat Keterangan/Ijin Penelitian dari BAPEDA Kabupaten Sleman
- Surat Keterangan/ Ijin Penelitian dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB I

A. Penegasan Judul

Peranan

Peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tingkah yang diharapkan orang yang berkedudukan di masyarakat.¹ Sedangkan peran yang penyusun maksud disini adalah tugas atau kewajiban yang dilakukan oleh lembaga Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dalam membantu memberikan modal kepada masyarakat ekonomi lemah di desa Maguwoharjo.

Badan Usaha Kredit Pedesaan

Sebuah lembaga keuangan mikro milik pemerintah yang berupaya mengembangkan perekonomian dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat golongan ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya melalui pemberian kredit untuk permodalan usaha.

Mengentaskan kemiskinan

Mengentaskan kemiskinan disini adalah mengangkat orang miskin atau orang yang kurang berdaya dari kehidupannya yang serba kurang ke kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan batasan-batasan dari istilah-istilah di atas maka yang dimaksud judul skripsi “Peran Badan Usaha Kredit Pedesaan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta” ini adalah peran yang dilakukan oleh BUKP

¹E. St. Harahap, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal.217.

kecamatan Depok dalam membantu memperbaiki keadaan masyarakat miskin di Desa Maguwoharjo.

B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan persoalan yang dihadapi manusia, yang sama tuanya dengan usia manusia itu sendiri dan implikasinya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, tetapi sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kemiskinan adalah suatu hal yang nyata adanya bagi mereka yang tergolong miskin. Mereka itu sendiri yang merasakan dan menjalani kehidupan dalam kemiskinan tersebut. Kemiskinan itu akan lebih terasa lagi apabila mereka membandingkannya dengan kehidupan orang yang lebih tinggi tingkat kehidupannya.

Kemiskinan juga merupakan masalah yang muncul atau sebagai dampak dari berbagai keberhasilan pembangunan selama ini yang belum teratasi dan senantiasa perlu mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengatasinya. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multi dimensi, yakni berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan sebagai realitas kehidupan selalu digambarkan sebagai suatu keadaan kehidupan yang kekurangan, lemah dan tidak berkecukupan

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam pengertian spiritual maupun material.²

Bank Dunia mengumumkan, saat ini, separuh penduduk Indonesia (49 persen) atau 108,78 juta orang, hidup dalam kondisi miskin dan rentan miskin. Mereka hidup dengan penghasilan kurang dari 2 dolar AS (Rp 18.000) perhari. Indikator kemiskinan lainnya, 25 persen anak Indonesia dibawah usia 5 tahun, menderita gizi buruk. Dari setiap 1000 kelahiran, terjadi 307 kematian ibu.³

Lepas dari perdebatan indikator yang digunakan, data kemiskinan di negeri ini terus menunjukkan tren buruk. Jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 17% dari populasi penduduk yang kini telah mencapai angka 220 juta jiwa. Menurut data resmi Susenas (BPS 2006) jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 juta jiwa (15,97%) menjadi 49,05 juta jiwa (20,3%) sementara data penganggur menurut data Sakernas (BPS 2006) juga terus meningkat dari 10,9 juta jiwa pada Februari 2005 menjadi 11,1 juta jiwa (10,4%) pada Februari 2006.

Penduduk miskin di daerah Yogyakarta yang tercatat dalam data penduduk yang dikeluarkan oleh Bapeda DIY dan disampaikan oleh Drs Sulthoni Nurifat M.Si pada acara seminar awal tahun dengan tema Prospek Kebijakan Pemprov DIY dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Jum'at 5 Desember 2007, adalah Gunung Kidul 95.722 KK (34,80%), Kulon Progo 42.345 KK (15,39%), Bantul 64.386 KK (23,40%), Sleman 52.976 KK

²Musa Asy'ari, *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi, 1997), hlm. 26.

³Rahmat. "Keprihatinan Akhir Tahun," *Radar Jogja*, (26 Desember, 2006), hlm. 4.

(19.26%), kota Yogya 19.681 KK (7,15%). Total keseluruhannya 275.110 KK.⁴

Pembangunan nasional dalam pencapaian tujuannya diperlukan suatu proses perubahan yang terencana, terarah dan berkesinambungan, yang dilaksanakan secara luas dan melengkapi segala aspek, salah satu aspeknya adalah aspek ekonomi. Atas dasar tersebut dalam menghadapinya dibutuhkan peran aktif masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.

Pemerintah merasakan perlu adanya penyediaan bantuan-bantuan secara melembaga, berupa sarana dan prasarana keuangan di tengah masyarakat pedesaan. Sarana prasarana tersebut dapat digunakan untuk mendukung semua jenis kegiatan produktif di pedesaan sehingga nantinya diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu sarana prasarana di Yogyakarta adalah didirikannya Lembaga Keuangan Mikro dengan nama Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP). BUKP didirikan di tiap-tiap kecamatan dan wilayah kabupaten/kota se-propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasar Peraturan Daerah nomor 1 tahun 1989. Adapun pemilik modal BUKP adalah Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah tingkat II. Lembaga ini merupakan mitra usaha kecil dan digunakan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan pedesaan.

BUKP didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian dalam rangka meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. BUKP

⁴Sulthoni Nurifat, "Prospek Kebijakan Pemprov DIY dalam Pemberdayaan Ekonomian Masyarakat", [http:// www.umy.ac.id/berita.php?id=496](http://www.umy.ac.id/berita.php?id=496), diakses 29 Mei 2007.

mempunyai kiat mengadakan usaha permodalan dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat yang mudah sehingga memungkinkan terjangkau oleh semua masyarakat pedesaan yang membutuhkan permodalan. Didirikannya Lembaga Keuangan Mikro BUKP bukan mengajarkan pada masyarakat untuk belajar berhutang tetapi untuk menghindarkan masyarakat dari peminjaman modal pada rentenir atau pengijon, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya dan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Kecamatan Depok merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman dan kecamatan ini adalah salah satu target dari pelaksanaan BUKP. Dengan adanya BUKP ini dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan kemiskinan secara berkelanjutan di Kecamatan Depok. Desa Maguwoharjo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Maguwoharjo terletak pada 7°46'21" LS dan 110°25'30" BT, dengan luas wilayah 992.8300 Ha, dan jumlah penduduk 26.308 jiwa. Nama Maguwoharjo diambil dari nama lapangan terbang yang ada di wilayah ini yakni lapangan terbang Maguwo, yang sekarang lebih dikenal dengan Bandar Udara Adisucipto. Selain Bandar Udara Adisucipto, beberapa obyek vital yang terdapat di wilayah ini diantaranya adalah: Kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan Stadion Internasional Sleman.

Desa Maguwoharjo merupakan desa yang memiliki keanekaragaman wilayah dengan fungsi yang berbeda, adanya wilayah pertanian, pendidikan, peribadatan dan lain-lain. Sarana prasana di desa Maguwoharjo cukup mudah

didapatkan. Hampir seluruh wilayah desa Maguwoharjo yang menghubungkan satu dusun dengan dusun lainnya sudah menggunakan jalan aspal.

Pembangunan secara pesat dimulai sejak awal tahun 1993 dengan dibangunnya beberapa kampus di daerah ini. Dengan dibangunnya dua perguruan tinggi yang cukup besar yaitu Stiper dan Sanata Darma. Dari kedua perguruan tinggi tersebut desa Maguwoharjo mendapatkan input yang tidak sedikit antara lain adalah kos-kosan ataupun dengan dibukanya fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi pelajar seperti warung makan dan rental komputer dan sarana prasarana lainnya. Meskipun desa Maguwoharjo bias dikatakan maju namun tingkat ekonomi maupun pendidikan masyarakatnya bisa dikatakan sedang. Hal ini bisa dilihat usia pelajar yang tidak meneruskan pelajarannya ke jenjang yang lebih tinggi, padahal desa Maguwoharjo sendiri sudah memiliki banyak fasilitas bagi pendidikan yang cukup memadai.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah tersebut maka dapat penyusun rumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah peran BUKP dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimanakah peran BUKP dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi keilmuan terutama bagi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam khususnya dalam aspek ekonomi

b. Kegunaan Teoritis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan acuan awal untuk mendapatkan data lainnya yang lebih komperehensif dalam penelitian masalah yang sama atau penelitian yang bersinggungan dengan pokok-pokok bahasan yang ada dalam penelitian ini.

2. Bagi BUKP Kecamatan Maguwoharjo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi BUKP dalam mengentaskan kemiskinan.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang penelitian ini, berikut akan diketengahkan beberapa hasil penelitian dan buku-buku sebagai perbandingan.

Buku yang ditulis oleh Bagong Suyanto dengan judul *Perangkap Kemiskinan: Problem dan Strategi Pengentasannya* terbitan Aditya Media Yogyakarta. Dalam buku ini dijelaskan adanya kesan hasil-hasil pembangunan selama ini lebih banyak dinikmati kalangan tertentu saja sehingga memunculkan kesenjangan bukan hanya antara miskin dan kaya, akan tetapi antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Buku ini juga mencoba menjelaskan cara-cara atau solusi dan strategi dalam pengentasan kemiskinan dan juga sebagai bentuk masukan terhadap pemerintah dan aparatnya di daerah-daerah agar memikirkan, mengevaluasi dan merumuskan strategi pengentasan kemiskinan.

Buku yang berjudul *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaanan* terbitan Sinar Harapan karya Parsudi Suparlan. Dalam buku ini dia memandang bahwa kemiskinan adalah sebuah fenomena yang tidak semata-mata diakibatkan oleh segi buruk suatu sistem sosial masyarakat, akan tetapi juga diperburuk oleh adanya kebudayaan kemiskinan. Buku ini mencoba mengungkapkan bagaimana kompleksnya kemiskinan yang berada di perkotaan dan juga memberikan kedalaman dimensi pemahaman terhadap suatu sistem perekonomian tertentu maupun sistem sosial tertentu yang lebih berkemungkinan untuk melahirkan golongan miskin.

Pembahasan tentang kemiskinan telah dilakukan oleh Achmad Zainal Arifin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jurusan Perbandingan Agama dalam skripsinya yang berjudul *Pandangan Hidup Orang Jawa (Telaah Kritis Atas Munculnya Budaya Kemiskinan)*. Dalam penulisannya ia menyimpulkan bahwa

dalam memahami masalah kemiskinan di Indonesia, berkembang dua aliran pemikiran, yaitu yang melihat masalah kemiskinan sebagai campur tangan pemerintah dan yang memandang kemiskinan sebagai masalah budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan semangat pembangunan. Dalam hal ini pemerintah menganut paham yang kedua, dimana mereka menganggap orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Penilaian ini didasarkan pada ungkapan-ungkapan yang melekat pada masyarakat Jawa, seperti: “alon-alon waton kelakon”, “ono dino ono upo”, yang dipandang merupakan manifestasi dari hidup yang masif.

Penelitian mengenai kemiskinan ini juga telah dilakukan oleh Asy'ari mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Skripsinya berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Demangan Gondokusuman (Studi atas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan(P2KP))*. Dalam skripsinya ini dipaparkan bahwa P2KP merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah dengan tujuan masyarakat dapat menolong dirinya sendiri dari jerat kemiskinan. Proyek ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Disini dipaparkan juga mengenai strategi-strategi yang dilakukan P2KP beserta hambatan-hambatannya dalam menanggulangi kemiskinan di daerah Demangan.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, untuk kajian dalam bentuk buku belum ada yang membahas tentang BUKP Kecamatan Depok secara lengkap

seperti yang akan penyusun lakukan, dimana penelitian ini akan memfokuskan pada peran BUKP dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Maguwoharjo.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang peranan

a. Pengertian peranan

Secara etimologi peranan adalah suatu hal yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan utama, sedangkan secara terminologi peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang atau lembaga melaksanakan hak-hak sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranannya.⁵ Sedangkan menurut Gross Mason dan MC Eacher peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menduduki kedudukan sosial tertentu.⁶

Dari definisi di atas ada dua harapan yang terkandung dalam peranan:

1. Harapan-harapan masyarakat terhadap pemegang peranan atau kewajiban-kewajiban dari pemegang harapan.
2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peranan terhadap masyarakat serta orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranan atau kewajiban-kewajibannya.⁷

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban harus ada keseimbangan antara pemegang peranan dengan masyarakat, sehingga akan terhindar dari

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 268.

⁶ David Bery, *Pokok-pokok Pikiran dalam sosiologi*, disunting oleh Paulus Wiritomo, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 199.

⁷ *Ibid*, hal.101.

misscommunication. Suatu peranan paling sedikit mengandung tiga hal antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.⁸

Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan dengan orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungan sosial yang ditaati oleh kedua belah pihak, apabila hal tersebut tidak terpenuhi atau adanya kesenjangan antara kedua belah pihak, maka terjadi role distance.⁹

b. Unsur-unsur peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila dikaitkan dengan pola perilaku, peranan memiliki beberapa unsure, antara lain:

1. Peranan ideal

Peranan ini merupakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu, peranan ideal ini merumuskan hak-hak dan

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 221.

⁹ *Ibid*, hlm. 222.

kewajiban yang terkait dalam status tertentu misalnya peranan ideal ayah terhadap anak.

2. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

Peranan ini merupakan hal yang oleh individu harus dilakukan pada saat tertentu artinya dalam situasi tertentu seseorang harus melaksanakan peranannya.

3. Peranan yang harus dikerjakan.

Peranan ini merupakan peranan sesungguhnya harus dilakukan oleh individu dalam kenyataannya, misalnya peranan guru terhadap muridnya.¹⁰

2. Tinjauan Tentang Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi deprivasi (kehilangan) terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar.¹¹

Parsudi Suparlan, mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹²

Kemiskinan oleh Soerjono Soekanto diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan

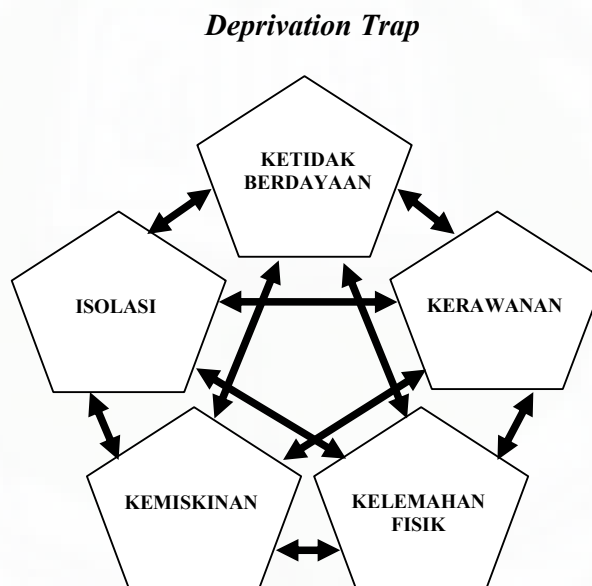
¹⁰ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 35.

¹¹ Bambang Sudibyo dkk, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 9.

¹² Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: YOI, 1995), hlm. 11.

taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kehidupan tersebut.¹³

Dalam pandangan Chambers kemiskinan merupakan kondisi deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan. Berdasarkan hasil penelitiannya yang dilakukan di Asia Selatan dan Afrika, Chambers menyimpulkan bahwa inti dari kemiskinan adalah *deprivation trap*.



Lima ketidakberuntungan tersebut yang oleh Chambers disebut *deprivasi trap* atau lingkaran setan kemiskinan atau sindrom kemiskinan atau perangkat kemiskinan meliputi: kemiskinan itu sendiri, kelemahan jasmani, isolasi/ketersinggungan, kerentanan/kerawanan, dan ketidak

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 349.

berdayaan. Penjelasan Chambers mengenai lima hal tersebut sebagai berikut.

Kemiskinan, merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan faktor-faktor yang lain. Kemiskinan menyebabkan kelemahan jasmani karena kekurangan makan, yang pada gilirannya menghasilkan ukuran tubuh yang lebih kecil; kekurangan gizi menyebabkan ketahanan tubuh terhadap infeksi dan penyakit menjadi rendah, padahal tidak ada uang untuk berobat ke klinik atau ke dokter; orangpun menjadi tersisih, karena tidak bisa membiayai sekolah, membeli pesawat radio atau sepeda, menyediakan ongkos untuk mencari kerja, atau bertempat tinggal di dekat pusat keramaian dan dipinggir jalan besar; orang menjadi rentan terhadap keadaan darurat atau kebutuhan mendesak karena tidak mempunyai kekayaan; dan menjadi tidak berdaya karena kehilangan kesejahteraan dan mempunyai kedudukan yang rendah; orang miskin tidak mempunyai suara.

Kemiskinan jasmani, mendorong orang kearah kemiskinan melalui beberapa cara: tingkat produktifitas kerja yang sangat rendah; tidak mampu menggarap lahan yang luas, atau bekerja lebih lama melalui upah yang rendah bagi kaum wanita atau orang-orang yang lemah, serta kelemahan karena sakit. Tubuh yang lemah seringkali membuat tersisih karena tidak bisa menemui pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat, terutama bagi wanita yang berkewajiban untuk mengurus anak-anak. Jasmani yang lemah memperpanjang kerentanan seseorang karena terbatasnya kemampuan untuk

mengatasi keadaan darurat, misal dengan bekerja lebih keras, mencari kegiatan baru atau mencari bantuan. Tubuh yang lemah menyebabkan orang merasa tidak berdaya, karena tidak punya kemampuan dan untuk berorganisasi, berpolitik; pendek kata orang yang kelaparan dan sakit-sakitan tidak akan berani berbuat macam-macam.

Isolasi (karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh terpencil, atau berada di luar jangkauan), ini semakin menopang kemiskinan; karena pelayanan dan bantuan pemerintahan menjadi tidak bisa menjangkau mereka; orang yang buta huruf tentu saja akan menjadi terjauhkan dari informasi yang mempunyai nilai ekonomi dan yang sebenarnya mereka perlukan, akibatnya ia masuk ke dalam daftar orang yang mendapatkan kredit. Isolasi ini akan bergandengan dengan kelemahan fisik; rumah tangga yang hidupnya terpencil, mungkin ditinggal keluarga dewasa karena mencari pekerjaan di kota. Isolasi membuat mereka semakin rentan. Usaha pertanian di lahan terpencil lebih sering gagal dan bantuanpun tidak segera didatangkan apabila terjadi keadaan darurat seperti bencana kelaparan dan wabah penyakit; orang buta huruf lebih sukar mendaftarkan diri untuk mendapat pembagian tanah, dan lebih mudah ditipu. Isolasi berarti kurang hubungan dengan para pemimpin politik atau bantuan hukum; sementara mereka tidak tahu apa yang dilakukan penguasa mereka.

Kerentanan, adalah salah satu mata rantai yang paling banyak mempunyai jalinan. Faktor ini berkaitan dengan kemiskinan karena orang terpaksa menjual atau menggadaikan kekayaan; berkaitan dengan

kelemahan jasmani untuk menangani keadaan darurat. Waktu dan tenaga mereka ditukar dengan uang untuk mengatasi goncangan yang mendadak dialami. Mereka terkadang kemudian menjadi amat tergantung dengan majikannya ataupun dengan orang yang dijadikan gantungan hidupnya.

Akhirnya ketidakberdayaan, mendorong proses pemiskinan dalam berbagai bentuk, antara lain yang terpenting adalah pemerasan oleh kaum yang lebih kuat. Orang yang tidak berdaya seringkali tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah, sedikit-tidaknya terhalang untuk memperoleh bantuan hukum, serta membatasi kemampuannya untuk menuntut upah yang layak ataupun menolak suku bunga yang tinggi. Orang miskin selalu menempatkan dirinya pada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi jual beli dan mereka hampir tidak punya pengaruh apa-apa dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, misalnya tentang bantuan-bantuan yang seharusnya untuk mereka sendiri.¹⁴

Ada dua kategori kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah.¹⁵

¹⁴Robert Chamber, *"Pembangunan Mulai dari Belakang"*, (Jakarta, LP3ES, 1987), cet I, hlm.145-147.

¹⁵Heru Nugroho, *"Kemiskinan Ketimpangan,dan Pemberdayaan,"* dalam Bambang Sudibyo, dkk., (ed), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 30.

3. Dimensi-dimensi Kemiskinan

Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat multi-dimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non ekonomi (sosial, budaya, politik). Karena bersifat multidimensional maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*). Untuk mengetahui seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif dan obyektif seperti mengukur kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka dan rupiah. Namun untuk memahami berapa besar kesejahteraan yang harus dipenuhi seseorang ukurannya menjadi sangat relatif dan kualitatif.

Heru Nugroho menyebutkan dalam kehidupan masyarakat terdapat tiga dimensi kemiskinan. Ketiga dimensi yang dimaksud adalah:¹⁶

Pertama, yang paling jelas bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, yaitu seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dengan rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari tingkat inflansi rupiah itu sendiri.

Kedua, kemiskinan berdimensi sosial budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan

¹⁶Heru Nugroho, "Kemiskinan Ketimpangan,dan Pemberdayaan," dalam Bambang Sudibyo, dkk., (ed), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 31-32.

membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidak berdayaan dan lain-lain. Untuk itu serangan terhadap kemiskinan sama artinya pula dengan pengikisan budaya ini. Apabila kebudayaan ini tidak dihilangkan maka kesulitan ekonomi juga sulit ditanggulangi.

Ketiga, kemiskinan yang berdimensi struktural atau politik artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah. Ada asumsi yang menegaskan orang yang miskin secara struktural atau politis akan berakibat pula miskin dalam material (ekonomi). Untuk itu langkah pengentasan-pengentasan kemiskinan apabila ingin efektif juga harus mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.

Dimensi-dimensi kemiskinan ini pada hakekatnya merupakan gambaran bahwa kemiskinan bukan hanya dalam artian ekonomi, tapi memperhatikan prioritas, namun bersamaan dengan itu seyogyanya juga mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomi. Ini sejalan dengan pergeseran strategi pembangunan nasional, bahwa yang dikejar bukan hanya semata-mata pertumbuhan ekonomi tetapi pembangunan manusia seutuhnya (sosial, budaya, politik)

Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik. Kemiskinan merupakan problem multidimensional yang penanggulangannya tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan politik bagi lapisan miskin merupakan suatu yang tidak dapat terelakan kalau pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dikehendaki.

Lapisan masyarakat miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi politik, tetapi karena beberapa hal suara kelompok ini terpendam dalam struktur politik. Agar lari dari problema kemiskinan maka pemberdayaan politik diperlukan sehingga masyarakat miskin dapat mampu bersuara dalam struktur politik tersebut. Semakin tinggi akses politis maka tinggi pula akses ekonomi yang dimiliki, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mengentaskan dirinya sendiri dari problem kemiskinan yang dihadapi.

4. Batasan Kemiskinan

Untuk melakukan kategorisasi apakah seseorang atau suatu keluarga termasuk miskin atau tidak, bukanlah pekerjaan yang mudah, karena hal tersebut erat kaitannya dengan keadaan yang bersifat kompleks dan amat dinamis. Oleh karena itu dalam rangka mempermudah melakukan kategorisasi tersebut, lalu muncul suatu konsep batas garis kemiskinan,

yang merupakan pembatas yang membedakan antara mereka yang miskin dan tidak miskin.¹⁷

M. Dawam Raharjo mengenalkan beberapa kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh beberapa ekonom sebagai berikut:¹⁸

Pertama, Sajogyo menetapkan angka pendapatan atau pengeluaran yang setara dengan 240 kg beras untuk daerah pedesaan dan 480 kg untuk daerah perkotaan atau kriteria rata-rata 360 kg beras. Dengan kriteria ini, golongan miskin dibagi menjadi tiga tingkatan: (1) paling miskin, bila jumlah pengeluaran yang diukur dengan ekuivalen beras hanya mencapai 270 kg perkapita per tahun untuk penduduk kota, dan 180 kg perkapita pertahun untuk penduduk desa; (2) miskin sekali, bila jumlah pengeluaran yang diukur dengan ekuivalen beras mencapai 360 kg perkapita per tahun untuk penduduk kota, dan 240 kg perkapita pertahun untuk penduduk desa; (3) miskin, bila jumlah pengeluaran yang diukur dengan ekuivalen beras mencapai 480 kg perkapita per tahun untuk penduduk kota, dan 320 kg perkapita pertahun untuk penduduk desa.

Kedua, kriteria Hendra Esmara yang mengukur garis kemiskinan dengan tingkat pengeluaran rata-rata dalam rupiah dan harga yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, gula, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

¹⁷Tadjuddin Noer Effendi, "*Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*", (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 250.

¹⁸Ahmadiono, "Islam, Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Al-Adalah*, Vol. 8:1 (April, 2005), hlm. 18..

Ketiga, kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengukur kemiskinan dengan tingkat pengeluaran setara 2100 kalori per kapita per hari plus pengeluaran non pangan seperti sewa rumah, biaya sekolah, kesehatan, transportasi dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok. Presentase pengeluaran non pangan itu meningkat bersamaan dengan meningkatnya pendapatan. Karenanya, batas garis kemiskinan juga mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu, misalnya, untuk daerah kota meningkat dari Rp 13.731 pada tahun 1984 menjadi Rp 17.381 pada tahun 1987, dan Rp 20.614 pada tahun 1990. sedangkan untuk pedesaan, meningkat dari Rp 7.746, menjadi Rp 10.294 dan Rp 13.295 pada tahun-tahun yang sama.

Peyusun dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada definisi kemiskinan yang diungkapkan oleh Sayogyo. Teori ini digunakan oleh penyusun untuk menentukan anggota BUKP yang dijadikan informan. Dan dengan batasan ini penyusun dapat mengetahui ada tidaknya perubahan setelah nasabah menerima bantuan dana kredit dari BUKP.

5. Tinjauan Tentang Pengentasan Kemiskinan

Problema kemiskinan bersifat multi-dimensional, maka strategi penanggulangannya juga harus bersifat multidimensional. Jika penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hanyalah bersifat ekonomi semata maka ini berarti menenggelamkan persoalan-persoalan kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi seperti kemiskinan struktural atau politis.

Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan masyarakat miskin.¹⁹

Pertama, pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politis. Langkah konkritnya adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial-politik dimana orang miskin tersebut tinggal. Tanpa kesadaran kritis orang miskin akan bersifat tidak berdaya dan cenderung akan menerima akan nasibnya.

Kedua, setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutuskan hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif (pendayagunaan) terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Pemutusan hubungan itu dapat dilakukan bila terjadi reformasi sosial, budaya dan politik. Artinya biarkan kesadaran kritis orang miskin muncul dan bersamaan itu biarkan pula melakukan reorganisasian dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya.

Ketiga, menanamkan rasa kesamaan (egalitarian) dan memberikan gambaran bahwa kemiskinan bukanlah takdir tetapi sebagai penjelmaan kontruksi sosial. Nasib orang miskin bukannya tidak dapat diubah tetapi dapat diubah dan yang mempunyai kekuatan untuk merubah adalah diri sendiri. Artinya Tuhan melahirkan umatnya di dunia dengan keadaan yang

¹⁹Heru Nugroho, "Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia," dalam Awam Setya Dewantara (ed), *Kemiskinan, ketimpangan dan pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hal.34-35.

sama. Kemiskinan dan ketimpangan bukan produk Tuhan tetapi produk masyarakat itu sendiri (*the social contruction*).

Keempat, merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Sebagai contoh, bagaimana merealisasikan program proyek kawasan terpadu (PKT) dengan perumus proyek utama itu adalah lapisan miskin. Ini hanya bisa tercapai kalau komunikasi politik antara pemegang kekuasaan, kelompok-kelompok dan person-person strategis, dan masyarakat miskin tidak mengalami distorsi. Apabila komunikasi politik distorsi maka rumusan pembangunan hanya mencerminkan kepentingan bukan lapisan miskin.

Kelima, perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Selain perubahan struktur yang diperlukan juga perubahan nilai-nilai positif kepada lapisan miskin seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja dan kualitasnya dan lain-lain.

Keenam, diperlukan redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. Meskipun kelima langkah diatas dapat dipenuhi tanpa infrastruktur yang memadai orang miskin tetap saja tidak memperoleh akses ekonomi yang akibatnya tidak memiliki juga akses kebidang-bidang lainnya.

Apabila langkah-langkah itu dapat dilaksanakan secara terpadu maka kemiskinan dapat ditanggulangi, dan apabila kemiskinan dapat ditanggulangi ketimpangan akan surut pula. Langkah-langkah diatas

merupakan gambaran antara deregulasi ekonomi dan deregulasi politik tidak dapat dipisahkan.

Kemiskinan telah menciptakan ketidakberdayaan dalam berbagai kehidupan manusia, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan tidak ada faktor penyebab tunggal dalam kemiskinan. Karena itu penanggulangannya juga tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang tunggal, diperlukan adanya pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan dari berbagai aspek kehidupan.²⁰

Dalam kaitannya mengentaskan kemiskinan Andree Bayo mengungkapkan dalam bukunya “Beberapa pendekatan dan Strategi Memerangi Kemiskinan” sebagai berikut:

Teori-teori pendekatan, strategi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pernah dan sedang digunakan dalam pembangunan untuk kemiskinan:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan

Peningkatan pembangunan memungkinkan pemerataan hasil-hasil pembangunan lebih luas sehingga menjangkau kelompok penduduk berpendapatan rendah. Proses pembangunan ini bisa dipercepat dengan diterapkan kebijaksanaan perpajakan dan subsidi yang mengalihkan sebagian hasil pendapatan kaum kaya kepada kelompok miskin. Maka secara teoritis, kebijakan pembangunan serupa ini akan mencapai pemerataan pembangunan yang akhirnya mencapai kaum miskin.²¹

²⁰Musya Asy'ari, *Islam, Etos Kerja dan Pembangunan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1997), hlm. 129.

²¹Andree Bayo Ala, *Beberapa Pendekatan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Akademika, 1985), hlm. 40.

2. Pendekatan Kebutuhan Dasar (*basic needs approach*)

Pendekatan kebutuhan dasar merupakan serangan langsung terhadap kemiskinan dan kepincangan pembagian pendapatan. Gagasan pembangunan dengan pemeratan, lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan (*basic need*) bagi penduduk miskin. Serangan langsung tersebut menurut Bintoro dan Mustofa Didjaya, mempunyai dua kelompok sasaran pokok yakni: pertama, mencukupi kebutuhan rumah tangga, kedua, mencukupi sarana dasar kehidupan masyarakat luas seperti minum, sanitasi, angkutan umum, kesehatan serta fasilitas pendidikan dan kebudayaan.²²

Berkaitan dengan strategi kebutuhan pokok, Mahfud Ulhaq mengatakan bahwa salah satu tema dalam strategi pembangunan yang paling disenangi oleh perancang pembangunan dan penyusun kebijakan adalah konsep kebutuhan manusia. Sekarang pada umumnya diterima bahwa dalam masyarakat miskin perencanaan produksi pada permulaan harus diarahkan untuk untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Bank dunia dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia mengemukakan beberapa usaha untuk mengentaskan kemiskinan:

- a. Menaikan pendapatan kaum miskin.
- b. Pendidikan bagi kaum miskin.
- c. Peningkatan kesehatan kaum miskin.
- d. Meningkatkan gizi kaum miskin.

²²*Ibid*, hlm. 41

- e. Mengurangi fertilitas dengan KB, Insertile dan lain sebagainya.²³

3. Pendekatan Publik (*Public Approach*)

Teodore W. Schultz mengajukan suatu pendekatan-pendekatan publik untuk mengentaskan kemiskinan antara lain:

- a. Meningkatkan upah dan harga hasil-hasil pertanian melalui peraturan perundang-undangan untuk menetapkan upah minimum dan menaikkan upah para buruh tidak terampil, serta menetapkan harga minimum dan menaikkan harga hasil pertanian dari para petani. Hal itu merupakan salah satu cara langsung dan efektif untuk mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan pendapatan kaum miskin.

- b. Pajak Progresif

Pajak Progresif digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin. Semakin besar kekayaan semakin besar pula pajak yang dikenakan padanya.

- c. Kesempatan kerja

Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan perluasan kesempatan kerja, sehingga lebih banyak orang terserap dalam lapangan pekerjaan. Dengan demikian, akan mengurangi pengangguran yang merupakan salah satu wajah atau aspek kemiskinan.

- d. Investasi publik bagi kaum miskin

Dalam rangka mengurangi kemiskinan, diperlukan investasi kaum miskin yakni orang-orang miskin dididik dan dilatih menjadi tenaga-

²³Andree Bayo Ala, *Beberapa Pendekatan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Akademika, 1985), hlm. 43-45.

tenaga terampil siap pakai sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses produksi.²⁴

4. Pendekatan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Teori ini dianggap kunci pokok pembangunan yang dapat menjamin kemajuan pokok ekonomi dan kestabilan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan prioritas kepada usaha peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan gizi.

Hal ini akan menumbuhkan inisiatif dan kewiraswastaan, maka akan tumbuh pula lapangan kerja baru sehingga produktifitas nasional akan meningkat, baru peranan modal dan teknologi yang sesuai mempunyai manfaat besar. Selain itu, perlu pula ditingkatkan daya juang atau semangat juang yang tinggi untuk menentang kemiskinan melalui motivasi. Orang miskin dimotivasi untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

Emil Salim mengatakan bahwa ikhtisar perombakan lingkaran setan kemiskinan bisa efektif apabila campur tangan luar berhasil menanamkan benih perubahan dalam kalbu penduduk miskin itu sendiri.²⁵

5. Pendekatan Struktural

Menurut John Friedman cara untuk mengatasi kemiskinan struktural adalah dengan jalan *impowermant of the poor* yaitu dengan

²⁴Andree Bayo Ala, *Beberapa Pendekatan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Akademika, 1985), hlm. 48-49.

²⁵Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, (Jakarta: Yayasan Indayau, t.t.), hlm. 7.

mengadakan pendekatan kolektif untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan pribadi dan anggota yang lain. Usaha untuk memberantas kemiskinan dilakukan dengan cara memberikan kesempatan lebih besar kepada kaum miskin untuk mencapai kekuasaan melalui organisasi sosial dan politik yang dapat membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan.²⁶

6. Pendekatan Anti Kemiskinan

Kerangka kerja kebijaksanaan pemberantasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan pendapatan serta kekayaan yang adil dan merata sebagai berikut:

a. Pemberdayaan usaha yang produktif.

Usaha produktif harus diberdayakan ke arah kewajiban moral, dan hasil dari usaha produktif tersebut dilukiskan sebagai karunia Tuhan. Sehingga dengan pengertian itu maka penghasilan hidup seseorang yang diperoleh melalui cara yang jujur juga dipandang sebagai bentuk peribadatan dalam Islam.

b. Kesempatan yang adil

Salah satu hak dasar ekonomi adalah setiap individu harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan kecakapan pembawaan sejak lahir sepenuhnya dan memilih profesi yang sesuai dengan bakatnya. Islam juga menentang adanya stratifikasi sosial, karena hal itu akan mengekalkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan.

²⁶Andree Bayo Ala, *Beberapa Pendekatan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Akademika, 1985), hlm. 58.

Komitmen Islam terhadap keadilan sosial menggarisbawahi penekanan yang tegas pada kesempatan yang sama.²⁷

c. Pemberdayaan sukarela bagi kesejahteraan kaum miskin

Menurut ajaran Islam, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh manusia yang kaya untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka bagi kesejahteraan fakir miskin, dan pemberian tersebut tanpa mengharapkan imbalan atau ganjaran tertentu didunia melainkan untuk memperoleh keridhoan Tuhan dan menimbulkan rasa malu dari mereka yang mendapat bantuan serta tidak seharusnya diikuti dengan peringatan (ancaman) tertentu pada penerima.

d. Sistem jaminan sosial

Ajaran Islam membebani negara dengan tanggung jawab pokok untuk menjamin tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara, dan secara moral mendorong kaum kaya membelanjakan uang untuk kesejahteraan kaum miskin. Manusia diperintahkan untuk memperlihatkan perhatian yang khusus terhadap kerabat yang miskin.

6. Islam dan Kemiskinan

Ajaran Islam menuntut agar umatnya dapat mengejar kehidupan manusia yang lebih banyak didunia, seperti firman-Nya :

وَلَا خُلَّةٌ وَلَا فِيهِ بَيْعٌ لَا يَوْمٌ يَأْتِي أَنْ قَبْلَ مَنْ رَزَقْتُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
الظَّالِمُونَ هُمْ وَالْكَافِرُونَ شَفِيعَةٌ

²⁷Ziaddin Ahmad, *Al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 1998), hlm. 16-17.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim”.

Secara implisit ayat ini menuntun agar umatnya memberantas kemiskinan, atau paling tidak menyuruh umatnya untuk tidak hidup dalam keadaan miskin, yang mana keadaan tersebut dapat menghilangkan kekuatan, dapat menghilangkan harga diri, dan dapat menjadikan seseorang hidup apatis dan pesimis.²⁸

Islam menolak pandangan golongan yang berpendapat kemiskinan merupakan sesuatu yang suci dan tidak perlu diselesaikan. Islam memandang bahwa kekayaan itu adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya dan harus disyukuri. Sedangkan kemiskinan itu hanya merupakan suatu cobaan atau bencana dan hanya dengan pertolongan Allah semua itu dapat dihindari.

Islam sangat menganjurkan umatnya terlepas dari kemiskinan, bahkan Islam tidak melarang umatnya hidup kaya, asalkan didalam mencari harta kekayaannya dilakukan dengan cara yang baik dan benar serta tidak menyimpang dari ajaran agama. Islam juga menolak terhadap pandangan golongan yang mensucikan kemiskinan. Karena tak ada satu ayat Al-Qur'an dan hadis yang memuji kemiskinan. Tetapi sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya bersikap zuhud, dalam arti orang yang berharta akan tetapi mampu

²⁸Muhammad Atha', *Sejarah Dakwah Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 122.

menjadikan hartanya itu dibawah kekuasaannya bukan sebaliknya dirinya yang dikuasai dan diperbudak hartanya.

Yusuf Qardawi menyebutkan bahwa kemiskinan sebagai bahaya yang menakutkan. Ia berpendirian bahwa kemiskinan dapat mengancam terhadap individu maupun masyarakat dalam beberapa aspek, diantaranya.²⁹

1. Kemiskinan membahayakan akidah.

Tidak pelak lagi, kemiskinan adalah ancaman yang sangat serius terhadap akidah, khususnya bagi kaum miskin yang bermukim di lingkungan kaum berada yang aniaya. Terlebih lagi jika kaum dhuafa ini bekerja susah payah sementara golongan kaya hanya bersenang-senang. Dalam kondisi seperti ini, kemiskinan dapat menebar benih keraguan terhadap kebijaksanaan ilahi mengenai pembagian rezeki. Akibat kemiskinan dan ketimpangan sosial, bisa timbul penyimpangan akidah.

2. Kemiskinan dapat membahayakan akhlak dan moral.

Selain berbahaya terhadap akidah dan keimanan, kemiskinanpun berbahaya terhadap akhlak dan moral. Kemelaratn, kesengsaraan seseorang khususnya bila ia hidup di lingkungan golongan kaya yang tamak sering mendorongnya melakukan tindak pelanggaran. Sebuah ungkapan menyebutkan, suara perut dapat mengalahkan suara nurani. Lilitan kesengsaraanpun bisa mengakibatkan meragukan nilai-nilai akhlak dan agama.

3. Kemiskinan dapat mengancam kestabilan pemikiran.

²⁹Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press,1995), hlm. 23-30.

Malapetaka kefakiran dan kemiskinan tidak hanya terbatas pada sisi rohani dan akhlak. Bahayanya juga mengancam sisi pemikiran manusia. Bagaimana mungkin seorang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dirinya beserta segenap keluarga dapat berfikir dengan baik, apalagi tetangganya hidup dengan mewah?

4. Kemiskinan dapat membahayakan keluarga

Kemiskinan merupakan ancaman terhadap keluarga baik dalam segi pembentukan, kelangsungan maupun keharmonisannya. Dari sisi pembentukan keluarga, kemiskinan merupakan salah satu rintangan besar bagi para pemuda untuk melangsungkan perkawinan, disamping dipenuhinya berbagai syarat seperti mahar, nafkah dan kemandirian ekonomi.

Kita saksikan, betapa tekanan kemiskinan kadang-kadang mengalahkan nilai moral. Ia dapat memisahkan seorang suami dengan istrinya. Kondisi seperti ini mendapat perhatian hukum Islam. Menurut hukum Islam, hakim boleh menjatuhkan talak kepada seorang istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah. Hal ini untuk menjaga keselamatan sang istri dan sesuai pula dengan prinsip tidak merusak dan tidak pula dirusak.

Kemiskinan juga dapat merenggangkan hubungan antar anggota suatu keluarga. Bahkan kadang-kadang, memutuskan tali kasih sayang di antara mereka. Al-Qur'an pun mencatat fakta sejarah yang mengerikan, yaitu sebagian orang tua mengorbankan buah hatinya akibat lilitan

kemiskinan atau karena takut kemiskinan. Dengan keras Al-Qur'an menentang tindakan ini dengan mengancam pelakunya dengan hukuman berat. Firman Allah SWT:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.” (al-Isra’: 31)

5. Kemiskinan dapat mengancam kestabilan masyarakat

Lebih jauh lagi, kemiskinan berbahaya terhadap keamanan dan kestabilan masyarakat. Barangkali orang bisa bertoleransi jika kemiskinan yang melilitnya disebabkan oleh sedikitnya sumber penghasilan dan banyaknya jumlah penduduk. Tetapi, lain halnya bila kemiskinan itu disebabkan tidak adanya pemerataan, serakahnya segolongan orang, dan berfoya-foya sekelompok kecil masyarakat di atas penderitaan orang banyak. Kemiskinan seperti ini dapat menimbulkan keresahan dan kegoncangan ditengah masyarakat. Ia dapat memutuskan tali kasih sayang dan persaudaraan antar anggota masyarakat.

Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan aqidah, moral dan akhlak manusia, langkah ini diambil untuk melindungi keluarga-keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan diantara anggotanya.

Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, dapat memenuhi kebutuhan

pokok berupa sandang, pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Dalam hal ini sarana-sarana untuk menghapuskan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Sarana Pertama

Sarana ini khusus berhubungan dengan si miskin, yaitu keharusan bekerja semampunya apabila ia sanggup. Dalam hal ini, masyarakat dan negara diminta memberikan bantuan, baik berupa modal ataupun latihan keterampilan sampai ia memperoleh pekerjaan yang cocok.

2. Sarana Kedua

Segala hal yang berhubungan dengan pemberian jaminan kepada kaum miskin oleh jamaah muslim, baik karena memenuhi kewajiban atau mengharapkan ganjaran Yang Maha Kuasa. Jaminan ini diberikan dengan:

- a. Memberikan nafkah kepada karib kerabat.
- b. Menghormati dan menjaga hak tetangga.
- c. Mengeluarkan zakat secara suka rela walaupun negara tidak memungutnya.
- d. Melaksanakan berbagai kewajiban dari harta yang dimiliki, seperti membayar denda dan nazar serta membantu orang yang dalam kesulitan.

- e. Memberikan sedekah suka rela yang bersifat sementara ataupun seterusnya. Termasuk juga sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir.

3. Sarana Ketiga

Secara khusus, sarana ini berhubungan dengan negara Islam. Berdasarkan hukum, negara bertanggungjawab memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan baik muslim maupun *dzimmi* (non muslim yang hidup dibawah naungan pemerintah Islam) dan tidak memiliki sumber penghasilan. Sumber-sumber jaminan ini meliputi:

- a. Zakat, yang merupakan sumber pertama dan utama bagi perbendaharaan Islam dalam mengentaskan kemiskinan.
- b. Sumber penghasilan lain, seperti seperlima dari harta rampasan perang, *kharaj* (pajak hasil bumi yang dipungut dari nonmuslim), upeti, barang temuan tanpa tuan, warisan tanpa ahli waris, dan pendapatan perangkat produksi milik negara, seperti pabrik dan perusahaan.
- c. Berbagai sumber sampingan, seperti pajak tambahan yang diwajibkan kepada kaum berada untuk kebutuhan kaum papa. Hal ini berlaku bila zakat dan berbagai sumber lainnya tidak mencukupi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dimana penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan, menganalisa peran dan hambatan BUKP dalam mengentaskan kemiskinan di desa Maguwoharjo.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber tempat untuk memperoleh keterangan, menurut Suharsini Arikunto subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber penelitian.³⁰ Subyek penelitian bisa ditemukan dengan memilih informan untuk dijadikan *Key Informan* didalam pengambilan informasi di lapangan. Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala BUKP Kecamatan Depok
- b. Sekertaris BUKP Kecamatan Depok
- c. Aparat pemerintahan/kepala Desa Maguwoharjo
- d. Anggota BUKP Kecamatan Depok:
 - Ahli sumur
 - Tukang parkir
 - Peternak
 - Penjual pulsa
 - Pedagang pasar

³⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 90.

3. Obyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Maguwoharjo. Sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini memiliki luas wilayah 992.8300 Ha dan terdiri dari duapuluh pedukuhan. Yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah peranan BUKP dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Maguwoharjo.

4. Metode Penarikan Sample

Penarikan sample memungkinkan peneliti untuk mencari karakteristik populasi pada subyek penelitian yang relatif sedikit dan kemudian menggeneralisasikan temuannya pada populasi yang lebih besar. Adapun teknik pengambilan sample dilakukan secara *logical-purposive sampling*, yakni atas dasar apa yang diketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada. Responden yang dijadikan sample adalah orang/informan yang sengaja dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dalam proses pengumpulan datanya melalui beberapa cara, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan

terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penyusun observasi non partisipan artinya penyusun dalam pengamatannya terhadap obyek penelitian tidak terlibat secara langsung. Penyusun sebagai observatory nonpartisipan yang berada diluar situasi yang sedang diobservasi, metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap hal-hal yang menjadi peran dan hambatan BUKP dalam mengentaskan kemiskinan di desa Maguwoharjo serta solusi yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan diantara dua orang atau lebih secara langsung serta pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang relevan dengan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi dengan berpedoman pada garis besar tentang hal-hal yang ingin ditanyakan. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pengurus BUKP dan masyarakat Maguwoharjo yang menjadi anggota BUKP.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dimana yang menjadi data adalah dokumen yaitu mencari data mengenai

hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, arsip-arsip dan lain sebagainya.

6. Metode Pemeriksaan Data

Menurut Lexy J. Maleong, teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³¹ Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pemeriksaan yang memanfaatkan triangulasi.

Teknik triangulasi data tersebut dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dalam penelitian ini misalnya membandingkan apa yang dikatakan key informan dengan apa yang dikatakan oleh anggota BUKP, atau dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

7. Metode Analisa Data

Menganalisa data artinya menguraikan data, menjelaskan data, sehingga data tersebut pada akhirnya akan dapat ditarik pengertian-pengertian serta kesimpulan-kesimpulan.³² Dalam menganalisa data penyusun menggunakan metode deskriptif yaitu analisa data yang tidak dapat diukur secara langsung karena bukan menunjukkan suatu angka tapi dalam bentuk kategori-kategori data yang sejenis dikelompokkan kemudian

³¹Lexy J. Maleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 330.

³²Anas Sudiono, *“Diktat Kuliah Metode Reserch dan Bimbingan Skripsi”*, (Yogyakarta: UD. Rama, 1981), hlm. 61.

ditentukan dengan kenyataan menurut kegunaan. Maksudnya adalah dengan menganalisa data melalui penjelasan kata-kata yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Menurut Maleong,³³ langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk merangkum data, dipilih hal-hal yang pokok dan penting, dicari pola dan temanya dan selanjutnya dilakukan dengan membuat abstraksi.

b. Deskripsi Data

Deskripsi data dalam penelitian ini yakni menguraikan peran Badan Usaha Kredit Pedesaan dalam mengentaskan kemiskinan dan hasil yang dicapai oleh BUKP. Pendeskripsian ini dilakukan berdasarkan apa yang dilihat atau yang diperoleh selama penelitian

c. Pengambilan

Kesimpulan Data yang diperoleh dan disusun, selanjutnya dibuat kesimpulan. Ketiga langkah dalam menganalisis data tersebut menjadi acuan dalam menganalisis data-data penelitian sehingga dapat tercapai suatu uraian sistematis, akurat dan jelas.

³³ Lexy J. Maleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif* ", (Bandung: PT. Remaja Kerta Karya, 1998), hlm. 178.

BAB II

A. GAMBARAN UMUM BUKP

1. Sejarah Berdirinya Badan Usaha Kredit Keuangan (BUKP)

BUKP didirikan oleh Pemda Propinsi DIY yang dilaksanakan atas inisiatif bersama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY. BUKP didirikan pada tahun 1987.

Pendirian BUKP dilatarbelakangi oleh karena banyaknya anggota masyarakat golongan ekonomi lemah di desa-desa dan kecamatan yang tidak mampu berhubungan dengan bank, utamanya untuk memperoleh kredit. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mampu memenuhi persyaratan teknis yang dituntut perbankan, antara lain mengenai ketersediaan agunan. Akibat dari hal ini adalah golongan ekonomi lemah tersebut menjadi sasaran para rentenir yang mampu memberikan pelayanan tanpa prosedur berbelit-belit walaupun suku bunganya sangat tinggi. Oleh karena itu perlu untuk membentuk lembaga yang dapat menyediakan dana yang murah dengan prosedur yang sederhana dan proses yang cepat namun tetap dapat diawasi dan dikontrol untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Lembaga yang berbasis di kecamatan ini sedikit banyak diilhami oleh lembaga sejenis di beberapa propinsi daerah lain yang telah berdiri terlebih dahulu, seperti BKK (Badan Kredit Kecamatan) di Jawa Tengah yang telah berdiri sejak tahun 1970, LPN (Lumbung Pitih Nagari) di Sumatra Barat yang

telah berdiri sejak tahun 1972, dan KURK di Jawa Timur yang telah berdiri sejak 1979.

Program BUKP di daerah Yogyakarta telah dilaksanakan pada tahun 1987. Sebagai pilot proyek pada waktu itu dibentuk sembilan BUKP, masing-masing dua BUKP di setiap kabupaten (kecuali di Gunungkidul yaitu sebanyak tiga BUKP). Kota Yogyakarta sendiri tidak dijadikan sebagai wilayah pilot proyek. Pada saat pelaksanaan tahun 1987 ini ada sembilan BUKP dengan perincian sebagai berikut:

Kabupaten Bantul : BUKP Kecamatan Imogiri dan Srandakan.

Kabupaten Kulonprogo : BUKP Kecamatan Galur dan Temon.

Kabupaten Sleman : BUKP Kecamatan Godean dan Tempel.

Kabupaten Gunungkidul : BUKP Kecamatan Ponjong, Playen, Semin.

Karena setelah dievaluasi ternyata lembaga ini sangat dibutuhkan masyarakat golongan ekonomi lemah, maka diterbitkanlah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan pada tanggal 4 Februari 1989 yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi DIY Seri D Nomor 37 tanggal 16 April 1990 dan juga telah disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 581.34-150 pada tanggal 22 Februari 1990.

BUKP dapat dijumpai di setiap kecamatan diseluruh kabupaten DIY, ada 75 kantor BUKP yang siap melayani pemberian kredit dan menghimpun tabungan. Jumlah BUKP yang berada di Kota Yogyakarta sebanyak 14 buah,

Kabupaten Bantul sebanyak 17 buah, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 12, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 15, dan Kabupaten Sleman sebanyak 17 buah.

BUKP merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah propinsi, modal yang dialokasikan untuk setiap BUKP adalah Rp. 50.000.000,00 yang disetorkan secara bertahap. Modal ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan milik pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan desa untuk BUKP-BUKP di kabupaten atau milik pemerintah propinsi dan kota untuk BUKP di Kota Yogyakarta. Sebagai modal awal setiap BUKP menerima setoran sebesar Rp. 5.000.000,00. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 1989 untuk BUKP diwilayah kabupaten jumlah itu berasal dari tiga sumber, yaitu Rp. 2.500.000,00 berasal dari pemerintah propinsi, Rp. 500.000,00 berasal dari pemerintah kabupaten dan Rp. 2.000.000 dari pemerintah desa. Modal selanjutnya diambilkan dari dana RAPBD dan bagian keuntungan BUKP yang disetorkan ke pemda yang kemudian dikembalikan lagi ke BUKP sebagai tambahan setoran modal setelah dicatat sebagai pendapatan daerah.

Kecamatan Depok merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman dan BUKP di Kecamatan Depok mulai didirikan pada tahun 1996. Setiap BUKP pada umumnya dikelola oleh 3 sampai 5 orang pegawai yang terdiri atas seorang kepala, seorang kasir, seorang pembukuan, ditambah 1 orang atau lebih staf yang bertugas dibagian pemasaran. Pada saat ini BUKP Kecamatan Depok dikelola oleh 3 orang yang terdiri dari seorang kepala,

seorang kasir dan seorang pada bagian pembukuan. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kecamatan Depok berkedudukan dan berkantor di jalan Raya Tajem, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Telepon (0274) 7198717.



Kantor BUKP Kecamatan Depok

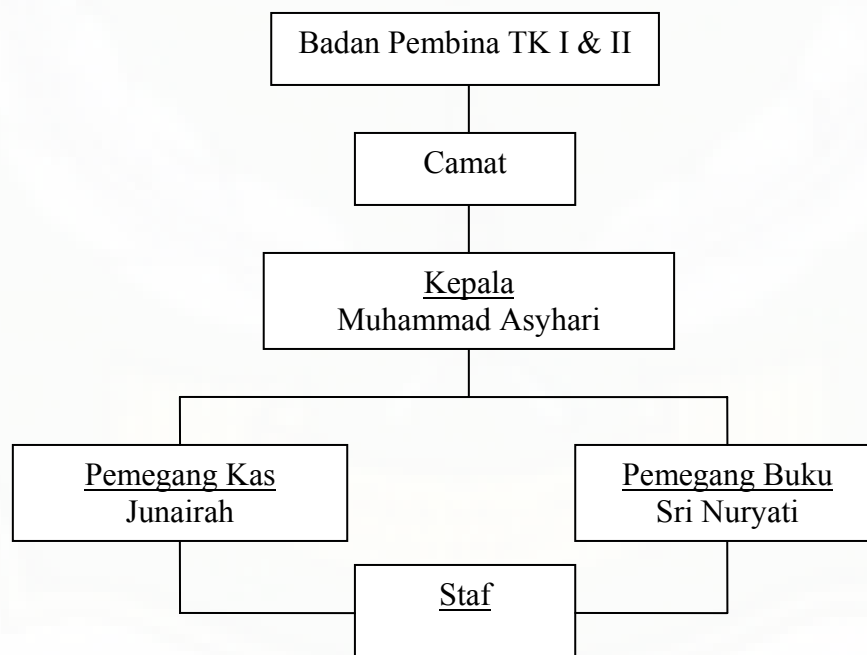
2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 1989 pada Bab IV pasal 4 dengan jelas disebutkan bahwa BUKP didirikan dengan **maksud dan tujuan** mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, murah. Selain itu BUKP juga bertujuan

menghindarkan masyarakat pedesaan dari pelepas uang/pengijon dan rentenir, menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dengan menyediakan modal melalui sistem perkreditan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi produktif. Dengan **motto** sederhana, cepat dan murah BUKP melaksanakan **misi** utamanya yaitu mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan kepada masyarakat pengusaha golongan ekonomi lemah di pedesaan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BUKP Kecamatan Depok:



Sumber : kantor BUKP Kecamatan Depok tahun 2007

Tugas dari masing-masing bagian BUKP akan diuraikan sebagai berikut:

1. Badan Pembina Tingkat I

- a. Merumuskan kebijaksanaan pengurusan dan pengelolaan BUKP berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab pada Gubernur.
- b. Menyusun tatacara pengawasan dan pengelolaan BUKP.
- c. Menggariskan kebijaksanaan keuangan.
- d. Menilai dan meneliti pembukuan BUKP.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur untuk perbaikan dan pengembangan BUKP.

2. Badan Pembina Tingkat II

- a. Melakukan pengawasan BUKP atas pelaksanaan kebijaksanaan yang digariskan oleh Badan Pembina Tingkat I.
- b. Membantu dan mendorong usaha pembinaan serta pengembangan BUKP.
- c. Meminta keterangan dan memberi saran kepada Kepala BUKP sehubungan dengan pengelolaan BUKP.

3. Camat

Selaku penanggungjawab dan melaksanakan pembinaan kepada para pengelola BUKP.

4. Kepala BUKP

- a. Menilai kelayakan permohonan kredit dari nasabah.
- b. Melaksanakan manajemen pengelolaan BUKP.

- c. Mengerjakan laporan statistik pinjaman.
- d. Menyusun neraca dan laporan rugi laba secara periodik.

5. Pemegang Buku

- a. Mencatat transaksi berdasarkan bukti kas dalam tabelaris.
- b. Mengerjakan sub buku dan buku besar.
- c. Menyusun neraca dan laporan rugi laba secara periodik.

6. Pemegang Kas

- a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang BUKP
- b. Membuat slip setoran maupun pengambilan dan mencantumkan nomor transaksi.
- c. Mencatat kartu kreditur sesuai dengan jenisnya.
- d. Mencatat transaksi dalam buku kredit kasir dan buku kas harian yang diketahui oleh kepala BUKP

7. Anggota/staf

Membantu mempromosikan BUKP dan memberikan pelatihan manajemen kepada nasabah/pengusaha kecil.

4. Jenis Kegiatan BUKP

a. Penghimpunan Dana

BUKP menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat atau anggotanya kepada BUKP berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Adapun jenis simpanan yang dilaksanakan BUKP terdiri dari:

a) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh nasabah pengambil kredit yang besarnya 5% dari jumlah kredit yang diambil pada saat dana kredit digulirkan.

b) Tabungan Sukarela

Tabungan sukarela adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan tanda terima, buku tabungan atau alat yang sejenis.

Pembukuan simpanan wajib, tabungan sukarela harus didasarkan pada suatu perjanjian tertulis antara BUKP dengan nasabah. Dalam pengesahan simpanan wajib dan tabungan sukarela ditanda tangani oleh kepala BUKP serta pengambilan simpanan wajib dan tabungan sukarela harus disahkan/disetujui oleh kepala kepala BUKP.

b. Penyaluran Kredit

BUKP memberikan kredit atau pembiayaan kepada perorangan yang mempunyai usaha mikro atau menjalankan usaha mikro di kecamatan wilayah kerjanya dan BUKP tidak memberikan kredit untuk usaha-usaha spekulatif dan usaha-usaha yang bersifat perjudian. BUKP hanya memberikan kredit di kecamatan wilayah kerjanya.

Jenis kredit yang dilaksanakan oleh BUKP ada 4 macam:

1. Kredit perdagangan
2. Kredit jasa

3. Kredit peternakan, perikanan dan perkebunan.
4. Lain-lain.

Jenis angsuran yang dijalankan oleh BUKP:

1. Angsuran Bulanan
 2. Angsuran Mingguan
 3. Angsuran Pasaran
 4. Angsuran Harian
- 5. Administrasi Pembukuan dan Pelaporan.**

BUKP melakukan dan memelihara pencatatan/pembukuan atas segala aktivitas kegiatan usahanya sesuai tata cara pembukuan yang berlaku, serta memastikan bahwa pencatatan yang dilakukan telah didukung dengan warkat-warkat dan dokumen-dokumen pendukungnya. Selain itu BUKP menata usahakan kegiatan usahanya yang berupa penghimpunan dana dan penyaluran kredit.

BUKP menyampaikan laporan mengenai keuangannya meliputi neraca dan laporan rugi laba serta keterangan lain yang diperlukan. Kepala BUKP menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap akhir bulan, meliputi:

- a. Saldo simpanan pihak ketiga.
- b. Statistik pinjaman.
- c. Kolektibilitas pinjaman.

Penyampaian laporan tersebut diatas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah akhir bulan dan penyampian laporan ditujukan ke akntor pusat BPD jalan Tentara Pelajar nomor 7, bagian pembinaan BUKP.

Direktur utama BPD melaporkan perkembangan BUKP setiap bulan kepada Badan Pembina Tingkat I dan Tingkat II dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Keadaan Karyawan dan Nasabah

BUKP sebagai lembaga keuangan mikro dalam perjalanannya mengalami kenaikan dan penurunan dalam hal nasabah dan sirkulasi keuangan. Pada tahun-tahun terakhir ini keadaan cukup stabil dan keuangan berjalan dengan lancar. Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh kedisiplinan nasabah dan karyawan BUKP sendiri. Dengan adanya kedisiplinan tersebut kelancaran usaha dapat tercipta.

Karyawan BUKP Kecamatan Depok saat ini berjumlah tiga orang. Berikut adalah gambaran karyawan BUKP tersebut secara lebih lengkap:

1. Nama : Muhammad Asyhari
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Umur : 37 tahun
- Pendidikan : SMU
- Status berkeluarga/belum : Berkeluarga
- Jabatan di BUKP : Ketua

2. Nama : Sri Nuryati
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 29 tahun
Pendidikan : S-1
Status berkeluarga/belum : Berkeluarga
Jabatan di BUKP : Pemegang Buku
3. Nama : Junairah
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 41 tahun
Pendidikan : S-1
Status berkeluarga/belum : Berkeluarga
Jabatan di BUKP : Pemegang Kas



Bapak Asyhari/Ketua BUKP Kecamatan Depok



Para Karyawan BUKP Kecamatan Depok

BUKP dalam usahanya meningkatkan profesionalisme kerja karyawan telah memberikan pendidikan dan latihan untuk para karyawannya. Jenis pendidikan dan latihan yang pernah diikuti oleh karyawan BUKP antara lain:

1. Pendidikan dan latihan karyawan BUKP.

Pendidikan ini ditujukan bagi karyawan yang baru diterima. Sehingga materi yang diberikan masih berupa dasar-dasar, baik itu dasar akuntansi, pembuatan laporan bulanan, dan RAPB BUKP, pengetahuan umum.

2. Diklat dasar perbankan BPR BKK, BKK, dan BUKP di Semarang.

Memperkenalkan sistem yang digunakan oleh BPR BKK di Jawa Tengah juga menjajaki kemungkinan penerapan sistem tersebut di BUKP. Program dilanjutkan dengan program magang di BKK yang ada di Jawa Tengah.

3. Pendidikan Perbankan yang diadakan oleh Bank Indonesia.

4. Pendidikan yang diadakan Sarana Yogya Ventura.

Dengan materi kebijakan pemerintah tentang perpajakan.

5. Pendidikan di pusat training perbankan.

Meliputi materi Account Officer, Credit Appraisal, Penganggaran dan Kepemimpinan.

6. Pendidikan karyawan BUKP yang diadakan oleh Biro Bina Perekonomian bekerjasama dengan Gama Citra Pratama.

BUKP Kecamatan Depok saat ini memiliki nasabah yang berjumlah 680 orang, yaitu 263 orang sebagai nasabah pengambil kredit dan 417 orang sebagai nasabah penyimpan dana. Nasabah yang mengambil kredit perdagangan sebanyak 144 orang. Nasabah yang mengambil kredit jasa sebanyak 44 orang. Nasabah yang mengambil kredit pertanian, perkebunan, peternakan sebanyak 27 orang. Dan yang mengambil kredit lain-lain sebanyak 58. Dari semua nasabah kebanyakan bertempat tinggal di Desa Maguwoharjo yaitu sekitar 50% lebih dan sisanya berasal dari desa-desa sekitar Maguwoharjo.¹

Adapun mengenai penggunaan dan pengembalian modal yang dilakukan oleh para nasabah BUKP Kecamatan Depok adalah:

1. Penggunaan Modal

¹ Hasil wawancara dengan Bpk Asyhari/Kepala BUKP kecamatan Depok, Tgl 15-08-2007.

Nasabah BUKP sebagian besar meminjam jenis kredit perdagangan yaitu sejumlah 144 orang dan hanya sebagian kecil yang meminjam jenis kredit pertanian yaitu sejumlah 44 orang. Modal yang mereka dapatkan digunakan sesuai dengan jenis kredit yang mereka ambil, diantaranya adalah:

- a. Kredit perdagangan, biasanya mereka menggunakan modal pinjaman dari BUKP untuk tambahan modal yang mereka miliki, jadi sebelumnya mereka telah mempunyai usaha namun karena modal yang kurang maka mereka meminjam kredit guna mengembangkan usaha mereka.
- b. Kredit pertanian, biasanya pengguna kredit ini menggunakan modalnya untuk membeli pupuk, bibit, peralatan pertanian dan biaya operasional namun ada juga sebagian kecil dari modal yang mereka dapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- c. Kredit Jasa, biasanya pengguna kredit ini menggunakan modalnya untuk menambah peralatan yang berkaitan dengan usaha jasa mereka dan juga untuk biaya operasional usaha mereka.
- d. Kredit lain-lain, dalam kredit ini modal yang digunakan bisa untuk kegiatan usaha apa saja selama usaha tersebut tidak bersifat spekulatif atau perjudian seperti ketentuan yang telah ditentukan BUKP.

2. Pengembalian Modal

Proses pengembalian kredit ini, para nasabah datang langsung ke kantor BUKP. Ketika ada nasabah yang telat dalam pembayaran angsuran kredit maka pihak BUKP akan mendatangi nasabah tersebut. Pihak nasabah dimintai keterangan atas keterlambatannya membayar angsuran kredit. Dari keterangan nasabah tersebut pihak BUKP akan mengambil sikap. Jika nasabah dapat menjelaskan secara logis mengenai alasan keterlambatannya, pihak BUKP akan memberikan kelonggaran waktu. Namun jika masa kelonggaran tersebut telah habis dan nasabah tidak bisa membayar angsuran maka nasabah akan dikenai denda sebesar 1% dari angsuran yang harus dibayarkan. Jika berkali-kali nasabah tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya maka jaminan kredit (surat tanah, BPKB, atau surat berharga lainnya) yang berada ditangan pihak BUKP akan menjadi hak milik BUKP sesuai dengan perjanjian. Dari nasabah yang mengambil kredit di BUKP hanya sebagian kecil saja yang mengalami keterlambatan yaitu sekitar 10% dan mereka biasanya bisa memenuhi pembayaran angsuran dalam masa kelonggaran yang diberikan BUKP.

Data diatas menggambarkan bahwa nasabah BUKP Kecamatan Depok dalam memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan perjanjian memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Hal ini memudahkan pihak BUKP dalam pengelolaan sirkulasi keuangan BUKP.

7. Sosialisasi

Pada saat peresmian BUKP Kecamatan Depok tanggal 2 Januari 1996 sekaligus menandai penerjunan langsung para karyawan BUKP ke masyarakat. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pembina umum BUKP. Pada saat peresmian BUKP Kecamatan Depok ini perangkat pemerintahan seperti camat, kepala desa, kepala dusun diundang untuk menghadirinya. Hal ini antara lain bertujuan sebagai media untuk menyebar luaskan informasi mengenai keberadaan BUKP, karena dengan kehadiran para perangkat pemerintahan tersebut diharapkan mereka dapat meneruskan informasi ini kepada seluruh warganya.

Peresmian BUKP Kecamatan Depok ini dilaksanakan di kantor lama BUKP yang beralamat di komplek pasar Setan Desa Maguwoharjo. Kantor lama BUKP ini secara letak cukup strategis karena berada di komplek Pasar Setan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi Desa Maguwoharjo. Dengan lokasi yang seperti ini secara langsung akan dapat diketahui oleh para pedagang pasar dan para pengunjung pasar yang berasal dari berbagai daerah, maka secara bertahap informasi mengenai keberadaan BUKP akan tersebar.

Cara ‘getok tular’ merupakan salah satu cara yang efektif untuk mensosialisasikan adanya BUKP. Nasabah yang telah ikut menikmati pelayanan yang diadakan BUKP baik dalam kredit maupun simpanan dan kemudian mereka menceritakan hal ini kepada orang-orang yang belum tahu atau belum bisa memanfaatkan keberadaan BUKP maka secara berangsur informasi mengenai BUKP ini akan meluas. Dan bagi mereka yang membutuhkan modal

untuk usaha diharapkan akan menjadikan BUKP sebagai alternatif. **Bpk asyhari** sebagai kepala BUKP Kecamatan Depok mengatakan:

“Getok tular adalah salah satu cara yang paling efektif dalam mensosialisasikan BUKP. Nasabah yang memanfaatkan kredit BUKP didalam memperoleh informasinya kebanyakan berasal dari teman-teman atau saudara mereka yang telah lebih dulu meminjam kredit di BUKP.”²

BUKP memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat terutama kegiatan yang didalamnya membahas permasalahan yang terkait dengan masalah ekonomi. Dengan kehadiran tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan adanya sebuah lembaga milik pemerintah yang bernama BUKP yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal peminjaman kredit dan penyimpanan dana.

BUKP mengagendakan sebuah acara dimana dalam acara tersebut BUKP mengundang atau menghadirkan masyarakat ditempat yang telah ditentukan utamanya para perangkat desa untuk memperkenalkan lebih jauh tentang keberadaan BUKP. Serta diadakan dialog interaktif yang membahas masalah yang terkait dengan usaha, permodalan, pengembangan usaha maupun menabung.

B. GAMBARAN UMUM DESA MAGUWO HARJO

Maguwoharjo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lurah desa ini adalah H. Imindi Kasmiyanto.

²Hasil wawancara dengan Bpk Asyhari/Kepala BUKP kecamatan Depok, Tgl 15-08-2007.

Maguwoharjo mempunyai kode pos 55282. Desa Maguwoharjo terletak pada 7°46'21" LS dan 110°25'30" BT, dengan luas wilayah 992.8300 Ha, dan jumlah penduduk 26.308 jiwa. Nama Maguwoharjo diambil dari nama lapangan terbang yang ada di wilayah ini yakni lapangan terbang Maguwo, yang sekarang lebih dikenal dengan Bandar Udara Adisucipto. Selain Bandar Udara Adisucipto, beberapa obyek vital yang terdapat di wilayah ini diantaranya adalah: Kampus Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dan Stadion Internasional Sleman.

Batas wilayah sebelah utara Desa Maguwoharjo adalah Desa Wedomartani, sebelah selatan berbatasan dengan landasan udara/AAU Adisucipto, sebelah barat berbatasan dengan Desa Catur Tunggal dan Desa Condong Catur, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwomartani. Adapun jarak dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 6 Km. Jarak dari ibukota kabupaten adalah 15 Km. Jarak dari ibukota propinsi adalah 10 Km. Serta jarak dari ibukota negara adalah 603 Km.

Pada mulanya Desa Maguwoharjo merupakan wilayah yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dan 2 (dua) kampung, masing-masing adalah: Kelurahan Kembang, Kelurahan Nayan, Kelurahan Tajem, Kelurahan Paingan, Kelurahan Padasan, Kampung Pengawatrejo, Kampung Blimbingsari. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka 5 (lima) Kelurahan dan 2 (dua) kampung tersebut kemudian digabung menjadi 1 desa yang otonom dengan nama Desa

Maguwoharjo. Secara resmi Desa Maguwoharjo ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN OLEH BUKP DI DESA MAGUWOHARJO.

A. Pendanaan BUKP

1. Pemerintah

BUKP merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah propinsi, modal yang dialokasikan untuk setiap BUKP adalah Rp. 50.000.000 yang disetorkan secara bertahap. Modal ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan milik pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan desa untuk BUKP-BUKP di kabupaten atau milik pemerintah propinsi dan kota untuk BUKP di Kota Yogyakarta.

Pada tahapan awal BUKP Kecamatan Depok menerima setoran sebesar Rp. 5.000.000. Jumlah itu berasal dari tiga sumber, yaitu Rp. 2.500.000 berasal dari pemerintah Propinsi Yogyakarta, Rp. 500.000 berasal dari pemerintah Kabupaten Sleman dan Rp. 2.000.000 dari pemerintah Desa Maguwoharjo. Modal selanjutnya diambilkan dari dana RAPBD dan bagian keuntungan BUKP yang disetorkan ke pemda yang kemudian dikembalikan lagi ke BUKP sebagai tambahan setoran modal setelah dicatat sebagai pendapatan daerah.

2. Swadaya

Pedoman utama dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan adalah dengan mendukung dan menunjang berkembangnya

potensi masyarakat melalui peningkatan peran serta, produktifitas dan efisiensi. Kondisi orang yang miskin karena suatu hal, sedangkan fisik dan mentalnya masih potensial untuk bekerja dan berusaha tetapi tidak memiliki modal, maka langkah pengentasannya adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha. Dan hal inilah yang dilakukan BUKP Kecamatan Depok terhadap masyarakat di Desa Maguwoharjo.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin perlu adanya susunan perencanaan yang mengaitkan sektor ekonomi dan sektor sosial secara menyeluruh, walaupun penekanannya tetap pada peningkatan sektor ekonomi dengan sasaran kelompok ekonomi lemah. Dengan demikian, kelompok sasaran ekonomi lemah atau miskin yang berpotensi memerlukan dorongan dan motivasi dalam membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta dapat mengembangkannya.

Peran BUKP dalam masyarakat yang dimaksud disini adalah merealisasikan tugas atau kewajiban BUKP dalam membantu memberikan modal dan menghimpun dana yang nantinya bisa bermanfaat dalam pengentasan kemiskinan yang dialami masyarakat khususnya masyarakat yang mempunyai usaha produktif. Dimana dengan hanya memiliki modal yang relatif sangat kecil ini mereka belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Sebuah lembaga keuangan bisa dikatakan baik apabila memenuhi empat syarat yaitu, *pertama* lembaga tersebut memenuhi syarat legal dan formal sehingga diakui keberadaanya oleh masyarakat. *Kedua*, lembaga itu

harus transparan. *Ketiga*, lembaga tersebut harus menguntungkan baik bagi masyarakat maupun bagi kelangsungan lembaga keuangan itu sendiri. Dan *keempat*, lembaga itu harus dapat memberikan pelayanan keuangan yang dapat menjangkau masyarakat.

Menguntungkan tidaknya lembaga bagi masyarakat dapat dilihat dari keadaan masyarakat sebelum dan sesudah menerima pelayanan lembaga, sedangkan bagi kelangsungan hidup lembaga dilihat baik dari aspek pemberian imbalan yang memadai bagi tenaga kerjanya, keuntungan finansial lembaga dari tahun ketahun, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak bagi perkembangan lembaga, dan lain-lain.

Dapat atau tidaknya lembaga menjangkau masyarakat dilihat dari golongan masyarakat mana yang mereka layani dan seberapa jauh cakupan pelayanan mereka. Melihat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia umumnya dan penduduk propinsi DIY khususnya adalah kelompok berpenghasilan rendah serta banyak yang belum terjangkau oleh pelayanan jasa bank umum maka lembaga keuangan mikro seperti BUKP menjadi memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan usahanya dalam melayani pangsa pasar tersebut. (mikro)

Salah satu kegiatan operasional BUKP adalah menghimpun dana masyarakat. Dalam penghimpunan dana masyarakat ini BUKP menyediakan beberapa alternatif bentuk simpanan yaitu tabungan sukarela dan simpanan wajib. Adapun dalam pelayanannya ini BUKP menetapkan ketentuan sebagai berikut:

a. Tabungan Sukarela

1). Persyaratan Umum Menabung.

- Mengisi formulir “Permohonan Tabungan” yang telah disediakan BUKP.
- Melampirkan fotocopy KTP/SIM.
- Mengisi formulir “Data Permohonan Tabungan pada BUKP” yang telah disediakan oleh BUKP.
- Menandatangani perjanjian tabungan.
- Setoran pertama minimal Rp. 5.000,-.

2). Penyetoran dan pengambilan tabungan.

- Penyetoran:

Jumlah minimal setoran, pada awal menabung jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah Rp. 5.000,-. Jumlah setoran berikutnya, setelah setoran pertama sebesar Rp. 5.000,- untuk setoran berikutnya tidak ada aturan jumlah minimal ataupun maksimal. Adapun untuk waktu penyetoran dana tabungan ini bebas tidak ada batasan waktu.

- Pengambilan:

Jumlah saldo yang harus tersisa pada saat pengambilan tabungan saldo minimal yang harus tersisa sebesar Rp. 5.000,- dan untuk nominal banyaknya pengambilan tabungan tidak ada batasan.

3). Keuntungan Menabung di BUKP.

- Tidak ada biaya administrasi pendaftaran
- Tabungan dapat dijadikan jaminan kredit.
- Tabungan tidak dikenai biaya administrasi tiap bulannya.
- Bunga dibayar setiap bulan.
- Frekuensi penarikan tidak dibatasi
- Tidak ada pajak bunga.
- Bunga tabungan sebesar 8% tiap tahunnya.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib merupakan simpanan yang harus dibayarkan oleh nasabah pengambil kredit yang besarnya 5% dari jumlah kredit yang diambil pada saat dana kredit digulirkan.

Kemampuan BUKP kecamatan Depok dalam menghimpun dana dari masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: *Pertama*, kepercayaan masyarakat pada BUKP, dengan adanya kepercayaan ini maka akan berpengaruh terhadap penghimpunan dana dari berbagai sumber terutama dari masyarakat atau institusi dimana tingkat kepercayaan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kinerjanya, yaitu tentang posisi keuangann, kapabilitas, integritas serta kapabilitas manajemennya.

Kedua, ekspektasi, yaitu perkiraan pendapatan yang akan diterima penabung dibandingkan dengan alternative investasi yang lainnya dengan tingkat resiko yang sama.

Ketiga, keamanan, yaitu jaminan keamanan atas dana nasabah (misalnya, dengan penjaminan dana dari pihak ketiga oleh pemerintah)

Keempat, ketepatan waktu, yaitu ketepatan pengembalian simpanan nasabah yang selalu tepat waktu.

Kelima, pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel.

Keenam, pengelolaan dana yang hati-hati.

Tabel Laporan Penghimpunan Dana BUKP

No	Tahun	Simpanan Wajib	Simpanan Sukarela	Total
1	Jan s/d Des 04	Rp 18.914.850	Rp 106.045.749	Rp 214.960.599
2	Jan s/d Des 05	Rp 20.869.350	Rp 118.071.545	Rp 138.940.895
3	Jan s/d Des 06	Rp 23.674.050	Rp 124.131.028	Rp 147.805.048
4	Jan s/d Agst 07	Rp 29.234.550	Rp 185.883.264	Rp 215.117.814

Sumber: Laporan Keuangan BUKP Kecamatan Depok 2008.

Dana yang berhasil dihimpun oleh BUKP dari masyarakat untuk tahun 2004 (bulan Januari s/d Desember)¹, sebesar Rp 214.690.599 yaitu dari simpanan wajib sebesar Rp 18.914.850 dan dari simpanan sukarela sebesar Rp 106.045.749. Sedangkan pada tahun 2005 (bulan Jnuari s/d Desember)² dana yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan yaitu Rp 138.940.895 dengan rincian dana dari simpanan wajib sebesar Rp 20.869.350 dan simpanan sukarela sebesar Rp

¹ Laporan Penghimpunan Dana oleh BUKP Kecamatan Depok, Jan-Desember 2004.

² Laporan Penghimpunan Dana oleh BUKP Kecamatan Depok, Jan-Desember 2005.

118.071.545. Pada tahun 2006 (bulan Januari s/d Desember)³ dana yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan yaitu Rp 147.805.048 dengan rincian dana dari simpanan wajib sebesar Rp 23.674.050 dan simpanan sukarela sebesar Rp 124.131.028. Begitupun pada tahun 2007 (bulan Januari s/d Agustus)⁴ dana yang berhasil dihimpun mengalami peningkatan yaitu Rp 215.117.814 dengan rincian dana dari simpanan wajib sebesar Rp 29.234.550 dan simpanan sukarela sebesar Rp 185.883.264.

Dalam kurun waktu empat tahun ini BUKP kecamatan Depok mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya dalam hal pengumpulan dana. Ini menunjukkan bahwa kinerja BUKP cukup bagus sehingga masyarakatpun berkenan untuk menabung di BUKP.

B. Peranan BUKP dalam Pengentasan Kemiskinan

1. Memberikan Permodalan dalam Bentuk Kredit.

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (Credere) yang berarti kepercayaan (truth atau faith). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran berupa kontraprestasi dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa.

³ Laporan Penghimpunan Dana oleh BUKP Kecamatan Depok, Jan-Desember 2006.

⁴ Laporan Penghimpunan Dana oleh BUKP Kecamatan Depok, Jan-Desember 2007.

Dalam kredit ini terdapat dua pihak berkepentingan langsung yakni pihak yang berlebihan uang disebut pemberi kredit (kreditor) dengan pihak yang membutuhkan dana yang disebut si penerima kredit (debitur).

a. Tujuan Kredit

BUKP dalam pengadaan kredit bertujuan mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, murah. Selain itu BUKP juga bertujuan menghindarkan masyarakat pedesaan dari pelepas uang/pengijon dan rentenir, menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan dengan menyediakan modal melalui sistem perkreditan yang diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi produktif.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh **Bpk Asyhari** sebagai kepala BUKP kecamatan Depok:

“BUKP didirikan untuk melayani masyarakat terutama yang berekonomi lemah dalam hal pemberian kredit untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha. Selain itu dengan adanya program kredit BUKP ini diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari para rentenir”⁵

b. Macam-macam kredit

BUKP Kecamatan Depok menyelenggarakan beberapa jenis jasa pelayanan dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, yaitu:

a. Kredit Perdagangan.

⁵ Hasil wawancara dengan Bpk Asyhari/Kepala BUKP Kecamatan Depok, Tgl 09-08-2007

Kredit ini ditujukan kepada pedagang yang memiliki modal kecil dengan sistem angsuran bulanan, mingguan, pasaran dan harian. Adapun besar pinjaman jenis kredit perdagangan ini minimal Rp 0,- dan maksimal Rp 10.000.000,- dengan suku bunga 2% tiap bulannya. Kredit perdagangan ini merupakan jenis kredit yang paling banyak diambil oleh masyarakat Kecamatan Depok yaitu sejumlah 144 orang.

b. Kredit pertanian, perikanan dan perkebunan.

Kredit ini ditujukan kepada para petani, peternak dengan sistem angsuran bulanan, mingguan, pasaran dan harian. Adapun besar pinjaman jenis kredit perdagangan ini minimal Rp 0,- dan maksimal Rp 10.000.000,- dengan suku bunga 2% tiap bulannya. Kredit pertanian, perikanan dan perkebunan ini merupakan jenis kredit yang paling sedikit diambil oleh masyarakat yaitu sejumlah 27 orang.

c. Kredit jasa.

Kredit ini ditujukan kepada para pengusaha yang bergerak dibidang jasa seperti tukang kayu, tukang jahit dan lain-lain dengan sistem angsuran bulanan, mingguan, pasaran dan harian. Adapun besar pinjaman jenis kredit perdagangan ini minimal Rp 0,- dan maksimal Rp 10.000.000,- dengan suku bunga 2% tiap bulannya. Yang memanfaatkan kredit jasa ini berjumlah 144 orang.⁶

d. Kredit lain-lain.

⁶ Hasil wawancara dengan Bpk Asyhari/Kepala BUKP Kecamatan Depok, Tgl 09-08-2007

Kredit ini banyak dimanfaatkan masyarakat untuk usaha-usaha yang bersifat menambah penghasilan. Jenis kredit ini kebanyakan diambil oleh masyarakat berprofesi sebagai pegawai negeri. Adapun besar pinjaman jenis kredit perdagangan ini minimal Rp 0,- dan maksimal Rp 10.000.000,- dengan suku bunga 2% tiap bulannya dengan sistem pengangsuran bulanan, mingguan, pasaran dan harian. Masyarakat yang memanfaatkan kredit ini sebesar 48 orang.

Dari keempat jenis kredit tersebut, nasabah di Kecamatan Depok banyak yang memanfaatkan jenis kredit perdagangan. Dengan sistem angsuran bulanan. Hal ini dikarenakan para nasabah BUKP kebanyakan memang bekerja sebagai pedagang yang memerlukan bantuan modal untuk pengembangan usahanya. Pemilihan pembayaran angsuran bulanan banyak dipilih dikarenakan para nasabah merasa lebih ringan dibandingkan harus mengangsur dengan sistem hari pasaran ataupun harian. Seperti yang disampaikan oleh **ibu Junairah** sebagai pemegang kas BUKP Kecamatan Depok bahwa para nasabah lebih memilih pembayaran kredit bulanan daripada kredit mingguan atau yang lainnya, karena dengan adanya batas waktu yang lebih lama maka nasabah akan punya cukup waktu untuk memutar dana dalam usahanya sehingga pada saat pembayaran angsuran telah jatuh tempo kemungkinan besar dana sudah dapat menghasilkan keuntungan.”⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Junairah/Pemegang Kas BUKP Kecamatan Depok, Tgl 09-08-2007

Dalam hal pinjaman ini para karyawan BUKP diperbolehkan untuk meminjam kredit di BUKP dan tidak ada perbedaan dalam beban bunga hanya saja angsurannya bisa diambil melalui gajinya tiap bulan (potong gaji). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu **Sri Nuryati** sebagai pemegang buku BUKP Kecamatan Depok, beliau menjelaskan bahwa karyawan BUKP boleh saja mengajukan permohonan kredit untuk usaha sedangkan pembayaran angsuran kredit bisa diambil dari gaji tiap bulannya atau potong gaji. Adapun ketentuan yang lainnya tidak ada perbedaan.⁸

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh kredit:

- a. Penduduk dalam kecamatan secara perorangan atau kelompok yang mempunyai usaha mikro.
- b. Mengajukan permohonan kredit kepada BUKP sesuai dengan domisilinya.
- c. Melampirkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- d. Mengisi data permohonan kredit yang telah disediakan oleh BUKP disahkan oleh Dukuh/Lurah/Camat setempat. Bagi anggota lama atau yang pernah meminjam di BUKP tidak memerlukan pengesahan dari Dukuh/Lurah/Camat.
- e. Menandatangani perjanjian kredit.
- f. Bagi yang sudah menikah, pinjaman kredit ditandatangani oleh suami istri.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Nuryati/Pemegang Buku BUKP Kecamatan Depok, Tgl 09-08-2007

- g. Menyiapkan jaminan kredit.

c. Proses perkreditan

- a. Pemohon datang dengan membawa surat pengantar tentang permohonan kredit dari kepala desa atau lurah pemohon.
- b. Setelah dilakukan tanya jawab secukupnya oleh bagian kredit dan dimungkinkan bisa diproses, pemohon diberi blanko permohonan kredit untuk diisi dan ditandatangani.
- c. Petugas mencatat permohonan kredit pada buku register permohonan dan realisasi pinjaman, kemudian menjajikan waktu peninjauan ke tempat nasabah.
- d. Dalam melakukan survey/peninjauan, dititikberatkan pada usaha yang nyata dan yang dapat dianalisa secara logis, berapa kemampuan melunasi/mengangsur tiap minggu atau tiap bulannya.
- e. Setelah mengadakan pemeriksaan/peninjauan dan dipertimbangkan antara besarnya permohonan dan besarnya hasil usaha maka dibuatkan analisa/pembahasan kredit, kemudian diajukan kepada direksi/pemimpin untuk mendapatkan disposisi pengambilan kredit dengan disertakan blanko analisa kredit dan semua berkas-berkas kreditnya.
- f. Setelah ada persetujuan dari pimpinan yang meliputi besarnya pinjaman, jangka waktu, dan bunga pinjaman maka dibuatkan:
 - 1) Surat perjanjian untuk ditandatangani pemohon dan pimpinan pada waktu realisasi.

- 2) Berita acara serah terima jaminan yang telah dicatat dalam buku register jaminan.
- 3) Bukti tanda terima uang jaminan pencairan kredit.
- 4) Kredit pinjaman untuk nasabah dalam mengangsur kredit.
- 5) Kartu pinjaman.
- 6) Dicatat dalam buku register permohonan dan realisasi program.

g. Setelah diberikan penjelasan seperlunya mengenai perjanjian kredit oleh petugas, ditandatangani dimuka pimpinan.

h. Bukti tanda terima uang pinjaman dan kitir pinjaman diserahkan kepada kasir selanjutnya kitir pinjaman diserahkan kepada peminjam.

i. Setelah semua berkas pinjaman diteliti dan ditandatangani oleh pimpinan, berkas pinjaman diarsip.

j. Perkembangan pinjaman selalu diikuti, bagi kreditur yang menunggak akan dilakukan peneguran atau penagihan.

k. Apabila terjadi pelunasan peminjaman, barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah sedangkan kitir pinjaman dan kartu jaminan diberi keterangan “jaminan telah diambil” kemudian dimintakan tanda tangan pengambil lalu disimpan diarsip.

Berikut ini laporan pengguliran dana kredit yang dilakukan selama jangka waktu empat tahun terakhir.

Tabel Laporan Penguliran Dana Kredit BUKP

No	Tahun	Dana yang digulirkan	Nasabah penerima kredit
1	Jan s/d Des 04	Rp 196.733.050	278
2	Jan s/d Des 05	RP 237.496.550	244
3	Jan s/d Des 06	Rp 290.417.250	252
4	Jan s/d Agst 07	Rp 360.573.800	286
	Total	Rp 108.522.0650	1060

Sumber: Laporan Keuangan BUKP Kecamatan Depok 2007

Dari data diatas terlihat bahwa adanya peningkatan dana kredit yang digulirkan kepada masyarakat dari tahun ketahunnya, meskipun ada penurunan dari jumlah nasabah penerima kredit yaitu 278 orang pada tahun 2004 dan pada tahun hanya 244 orang. Dana yang digulirkan BUKP untuk tahun 2004 (Jan s/d Des 2004) adalah sebesar Rp 196.733.050 dengan nasabah penerima kredit sejumlah 278 orang. Dana yang digulirkan BUKP untuk tahun 2005 (Jan s/d Des 2007) adalah sebesar RP 237.496.550 dengan nasabah penerima kredit sejumlah 244 orang. Dana yang digulirkan BUKP untuk tahun 2006 (Jan s/d Des 2006) adalah sebesar Rp 290.417.250 dengan nasabah penerima kredit sejumlah 252 orang. Serta dana yang digulirkan BUKP untuk tahun 2007 (Jan s/d Agst 2007) adalah sebesar Rp 360.573.800 dengan nasabah penerima kredit sejumlah 252 orang.

2. Konsultasi atau Pendampingan

Setelah dana digulirkan kepada nasabah dan usaha dijalankan, BUKP melakukan pendampingan kepada nasabah agar dana yang telah digulirkan dapat berkembang dan nasabah dapat lebih sejahtera. Selain itu pendampingan yang berupa konsultasi ini bertujuan agar nasabah dapat mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi dalam pengembangan usaha mereka. Dengan adanya solusi dari konsultasi yang diberikan oleh pihak BUKP ini diharapkan dana kredit yang telah digulirkan dapat dioptimalkan oleh nasabah dan dengan optimalnya pengelolaan dana kredit yang telah didapat ini diharapkan juga akan memperlancar pengangsuran kredit pada pihak BUKP. Dengan lancarnya pengangsuran pembayaran kredit ini dapat mempercepat perkembangan BUKP.

Pada masa awal berdirinya BUKP di Kecamatan Depok, konsultasi/pendampingan ini dapat terlaksana namun karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki karyawan BUKP terutama dalam hal pengetahuan mengenai manajemen usaha sehingga saran-saran yang bersifat solutif bagi permasalahan yang dialami oleh nasabah yang bermasalah dengan usahanya menjadi kurang optimal. Dalam mengatasi masalah sumber daya manusia ini BUKP mengadakan pendidikan pelatihan mengenai manajemen usaha, kewirausahaan dan pengetahuan umum ekonomi kepada karyawannya

Untuk pelaksanaan konsultasi ini ternyata tetap tidak dapat dilaksanakan secara maksimal meskipun telah diadakan pelatihan untuk

karyawan BUKP terutama pada masa kepengurusan Bpk Asyhari. Hal ini diakui sendiri oleh Bpk Asyhari sebagai ketua BUKP. Menurut beliau konsultasi untuk para nasabah penerima kredit ini seharusnya memang dilaksanakan secara maksimal oleh BUKP untuk membantu nasabah mengembangkan usahanya setelah mereka menerima bantuan kredit. Ketidak maksimalan konsultasi ini disebabkan karena jumlah personil yang hanya 3 orang sedangkan pekerjaan yang harus ditangani begitu banyak sehingga mereka sangat kerepotan. Selain itu ada juga persoalan yang datang dari nasabah dimana ketika ditanya mengenai perkembangan usahanya pasca pengkuliran dana, nasabah ini malah merasa tersinggung karena menurut si nasabah masalah usaha yang dijalankan adalah masalah pribadi jadi pihak BUKP tidak diperkenankan untuk tahu lebih banyak mengenai usaha si nasabah. Pihak BUKP hanya boleh tahu bahwa nasabah akan membayar cicilan kredit yang diambilnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan kondisi seperti ini tentu perkembangan dari nasabah tersebut akan sulit untuk dikontrol.⁹

3. Faktor Pendukung BUKP Eksis dan Dipercaya.

Faktor-faktor pendukung untuk pengelolaan BUKP agar senantiasa eksis dan dipercaya:

a. Permodalan

Permodalan sangat penting bagi BUKP karena disamping untuk pengembangan usaha, modal juga berfungsi sebagai alat untuk

⁹ Hasil wawancara dengan Bpk Asyhari/Kepala BUKP kecamatan Depok, Tgl 15-08-2007

menanggung resiko atas kerugian yang dialami selain itu harus memiliki kemampuan dan kemauan dalam memenuhi permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk modal kerja dan mengcover resiko kegagalan usaha.

b. Menggali sumber dana

Sebagaimana diketahui bahwa BUKP akan tumbuh secara sehat apabila pertumbuhan aktiva produktif dibiayai dari pihak ketiga yang berupa tabungan. Namun bila dilihat BUKP kecamatan Depok saat ini baru berhasil menghimpun dana dari masyarakat strata menengah kebawah. Kredibilitas dan terbatasnya dana operasional merupakan kendala untuk melaksanakan marketing secara aktif. Kegiatan penghimpunan dana sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

1. Kepercayaan masyarakat kepada BUKP akan mempengaruhi kemampuan menghimpun dana dari berbagai sumber terutama dari masyarakat atau institusi. Perlu diketahui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat ini dipengaruhi oleh kinerja, posisi keuangan, kapabilitas, integritas serta kredibilitas manajemennya.
2. Ekspektasi, yaitu perliraan pendapatan yang akan diterima untuk penabung dibandingkan dengan alternative investasi lainnya dengan tingkat resiko yang sama.
3. Keamanan, yaitu jaminan keamanan atas dana nasabah (misalnya, dengan dana pihak ketiga oleh pemerintah)

4. Ketepatan waktu, yaitu pengembalian simpanan nasabah yang harus tepat waktu.
5. Pelayanan yang lebih cepat dan fleksibel.
6. Pengelolaan dana yang harus hati-hati.

Dalam penghimpunan dana perlu menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat dan berprinsip bahwa simpanan masyarakat merupakan titipan yang setiap saat akan diambil oleh pemiliknya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Oleh karena itu, pengurus harus mampu menjaga dan tidak melakukan pretek-pretek yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

c. Sumber daya manusia

Pengelolaan BUKP dalam kondisi persingan yang semakin ketat dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, dalam arti mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan memberikan produktifitas yang tinggi. Produktifitas yang tinggi akan dicapai apabila pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki sumber daya manusia sesuai dengan tugas-tugas yang akan dikerjakan. Untuk itu pengetahuan dan keterampilan serta sikap sumber daya manusia perlu terus dikembangkan. Hasil yang dicapai akan lebih optimal apabila sumber daya manusia yang baik dan terlatih tersebut didukung dengan pemanfaatan waktu kerja yang efektif. Para pegawai hendaknya memanfaatkan waktu kerja dengan baik, hal ini tercermin dari kegiatan para pegawai yang selalu pada tempat kerja masing-masing untuk

menyelesaikan tugasnya. Selain itu hendaknya setiap pegawai/bagian telah memiliki uraian tugas jabatan masing-masing.

Berdasarkan pengamatan diketahui penyebab lemahnya kinerja BUKP yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh antara lain adalah sumber daya manusia, ini disebabkan pertama adalah pendidikan formal pengurus kurang memadai dan yang kedua adalah kurang memadainya pengetahuan perbankan yang dimiliki pengurus.

Persaingan bisnis saat ini sangat keras, maka memerlukan langkah-langkah penanganan untuk memberdayakan dan mengoptimalkan sumber daya manusia supaya mampu mempertahankan kelangsungan lembaga keuangan semacam BUKP, karena sumber daya manusia juga sebagai penentu dan mempengaruhi lembaga keuangan untuk bisa efektif dan efisien. Sumber daya manusia menduduki tempat yang paling strategis dan sangat penting karena sumber daya manusia adalah yang mengalokasikan dan mengelola sumber daya yang lain (finansial, teknologi, dan lain-lain). Sumber daya manusia dipandang suatu investasi yang jika dikembangkan dan dikelola secara efektif akan memberikan imbalan bagi lembaga dalam bentuk produktifitas yang lebih besar.

Untuk mencapai produktifitas yang tinggi kepada sumber daya perlu diberikan reward dan juga punishment. Namun perlu diketahui juga kebutuhan setiap personal (human need) melalui beberapa keinginan (wants) yang antara lain:

a. Penghasilan yang baik.

Penghasilan yang diterima harus mampu memuaskan kebutuhan psikologis, sosial dan lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika banyak karyawan menginginkan gaji yang tinggi.

b. Jaminan pekerjaan.

Pekerjaan yang memberikan penghasilan yang ajeg merupakan salah satu harapan karyawan.

c. Teman sekerja yang kompak.

Hal ini akan mendorong membentuk tim-tim kerja yang baik dan akan lebih efektif jika dipertimbangkan juga tata letak tempat kerja yang tepat dan prosedur-prosedur kerja yang mempertimbangkan hubungan manusia.

d. Penghargaan.

Kebutuhan egoistis manusia perlu diwujudkan dengan pujian, reward dan lain-lain.

e. Pekerjaan yang bermakna.

f. Kebutuhan untuk berprestasi.

g. Kesempatan untuk maju.

Pada umumnya orang ingin maju dalam hidupnya.

h. Kondisi kerja yang aman, nyaman, dan menarik.

i. Kepemimpinan yang mampu dan adil

Kepemimpinan yang baik turut menjamin lembaga selalu eksis.

j. Pengarahan dan perintah yang wajar.

Perintah harus terkait dengan pekerjaan.

k. Lembaga yang dihargai masyarakat.

Kecenderungan sosial yang menaruh harapan pada lembaga.

Dengan memperhatikan keinginan karyawan akan dicapai produktifitas yang tinggi namun sebaliknya bila ada karyawan yang melanggar disiplin/indisipliner akan diberikan punishment/hukuman.

d. Pengelolaan kinerja

Pengelolaan kerja yang kurang

D. Analisis Terhadap Para Nasabah

Dengan adanya BUKP kecamatan Depok, masyarakat miskin di desa Maguwoharjo sedikit demi sedikit bisa teratasi dan mereka juga bisa sedikit demi sedikit terlepas dari rentenir dan berpindah ke BUKP. Selain prosedurnya yang cepat dan mudah pembayaran angsuranpun bisa sesuai dengan kemampuan nasabah yaitu bisa beurpa angsuran harian, mingguan atau bulanan. Selain itu BUKP juga memotivasi masyarakat Maguwoharjo untuk bisa menyisihkan penghasilannya untuk ditabung di BUKP dengan tujuan sewaktu-waktu mereka memerlukan uang untuk keperluan yang mendadak dan darurat mereka sudah mempunyai simpanan dan tidak perlu lagi untuk lari dan meminjam kepada rentenir dengan bunganya yang sangat tinggi.

Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan nasabah antara sebelum dan sesudah mendapat kredit dari BUKP, dari beberapa nasabah yang ditemui di

lapangan mereka mengakui adanya peningkatan usaha yang mereka jalankan berkat bantuan kredit yang mereka terima dari BUKP.

Wawancara dengan Bapak **Edi Purwanto**, seorang nasabah yang mempunyai usaha jual beli pulsa :

“Saya mengetahui BUKP dari ayah saya yang kebetulan ayah saya adalah seorang nasabah yang pernah memanfaatkan kredit di BUKP kecamatan Depok. Saya tertarik bergabung dengan BUKP karena saya membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usaha saya. Selain itu dari informasi yang saya dapat bahwa bunga dari pinjaman di BUKP tergolong tidak memberatkan serta cara memperoleh kreditpun mudah. Saya mendapat bantuan modal dari BUKP sebesar satu juta. Dengan modal tersebut saya bersyukur karena usaha saya dapat mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu pesat dan ini sangat membantu pemenuhan kebutuhan hidup saya dan istri saya”¹⁰.

Manfaat dari pinjaman dari BUKP juga dirasakan oleh **Lugiyono** yaitu seorang nasabah BUKP yang bekerja sebagai ahli sumur. Bapak Lugiyono mengatakan:

”Usaha saya sebagai ahli sumur sangat terbantu dengan adanya dana pinjaman dari BUKP. Dengan modal yang didapat, saya dapat membeli perlengkapan pekerjaannya seperti pompa air, tali, obeng dan perlengkapan lainnya yang setelah dihitung totalnya bisa mencapai tiga jutaan. Ini tentu sulit sekali untuk dipenuhi jika tidak ada dana. Dengan adanya perlengkapan tersebut maka saya tidak perlu lagi menyewa perlengkapan pekerjaan. Jika saya masih memakai perlengkapan sewaan maka penghasilan yang dihasilkan akan sangat kecil karena habis untuk ongkos sewa. Dengan meningkatnya pendapatan ini kebutuhan keluarga terutama untuk memenuhi keperluan anak saya yang masih dibangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sedikit dapat terbantu.”¹¹

Dapat dikatakan bahwa BUKP dapat menunjukan perannya membantu nasabahnya mengembangkan usahanya. Dengan usaha yang berkembang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bpk Edi Purwanto/Nasabah BUKP Kecamatan Depok, Tgl 06-09-2007

¹¹ Hasil wawancara dengan Bpk Lugiyono/Nasabah BUKP Kecamatan Depok, Tgl 06-09-2007

maka pendapatanpun akan meningkat dan kehidupan perekonomiannpun akan meningkat.

E. Profil Nasabah Sukses

Sandiman, 67 tahun adalah seorang peternak sapi dengan pendidikan sampai kelas enam Sekolah Dasar. Sandiman bertempat tinggal didusun Sombo Merton, Desa Maguwoharjo. Ia didampingi seorang istri yang bernama Safari yang kini berusia 40 tahun. Safari adalah ibu rumah tangga yang telah mengenyam pendidikan sampai ketingkat Sekolah Dasar. Dari perkawinannya tersebut, pasangan ini dikarunia 4 orang anak.

Pada mulanya untuk menopang kehidupan sehari-hari keluarganya, Sandiman bekerja sebagai seorang tukang pijat. Dari pekerjaan sebagai tukang pijat ini ia merasa perlu adanya usaha tambahan untuk menopang kebutuhan rumah tangganya yang cukup banyak. Jika hanya mengandalkan pekerjaannya sebagai tukang pijat sandiman merasa kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena dari pekerjaan ini penghasilan yang didapat selalu berubah-ubah. Ketika pasien banyak pendapatan yang didapat lumayan banyak namun jika tidak ada pasien otomatis pendapatanpun tidak ada.

Untuk mensiasati pendapatan yang tidak menentu ini Sandiman mencoba meminjam dana kredit dari BUKP. Dana yang diperoleh dari BUKP dia gunakan untuk membeli kambing dan sebagian lagi ia gunakan untuk biaya pemeliharaan kambing dan ada sebagian lagi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari beternak kambing ini ternyata ia dapat

menambah pendapatannya. Dengan berkembang-biaknya kambing maka jumlah kambingpun makin banyak. Ketika jumlah kambing semakin banyak ini maka ia dapat menjualnya dan keuntungan yang didapat bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan ada sebagian kecil yang ditabung. Lambat laun usaha ternak kambingnya semakin banyak dan setelah itu Sandiman mencoba untuk memelihara sapi. Dan sekarang Sandiman mengkhususkan dirinya untuk memelihara sapi. Sapi yang dipunyainya telah mencapai sepuluh ekor.

Sandiman merupakan salah satu nasabah BUKP yang paling lama. Dari sejak BUKP berdiri di Kecamatan Depok pada tahun 1996, sejak itulah ia menjadi nasabah BUKP. Dalam memenuhi kewajibannya mengangsur dana kredit bulanannya selain mengandalkan dari usaha ternaknya ia juga tetap bekerja sebagai tukang pijat. Dan dia juga bersyukur dengan dana yang ia dapat dari BUKP telah dapat membantu usahanya dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

BUKP adalah sebuah lembaga keuangan mikro milik pemerintah yang berupaya mengembangkan perekonomian dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat golongan ekonomi lemah dalam mengembangkan usahanya melalui pemberian kredit untuk permodalan usaha.

Peranan BUKP dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Maguwoharjo difokuskan pada beberapa aspek yaitu pemberian kredit, penghimpunan dana berupa tabungan dan pendampingan yang berupa konsultasi kewirausahaan.

Hasil dari penelitian ini diketahui perubahan yang dialami masyarakat miskin di desa Maguwoharjo adalah peningkatan pengelolaan usaha dan peningkatan pendapatan.

Proses pengajuan permohonan kredit oleh nasabah yaitu dengan melengkapi syarat-syarat yang ditentukan pihak BUKP dan untuk menghindari kemacetan kredit BUKP melakukan survey dan analisa terhadap nasabah. BUKP juga memberikan konsultasi kepada para nasabah penerima kredit yang memerlukannya.

B. SARAN-SARAN

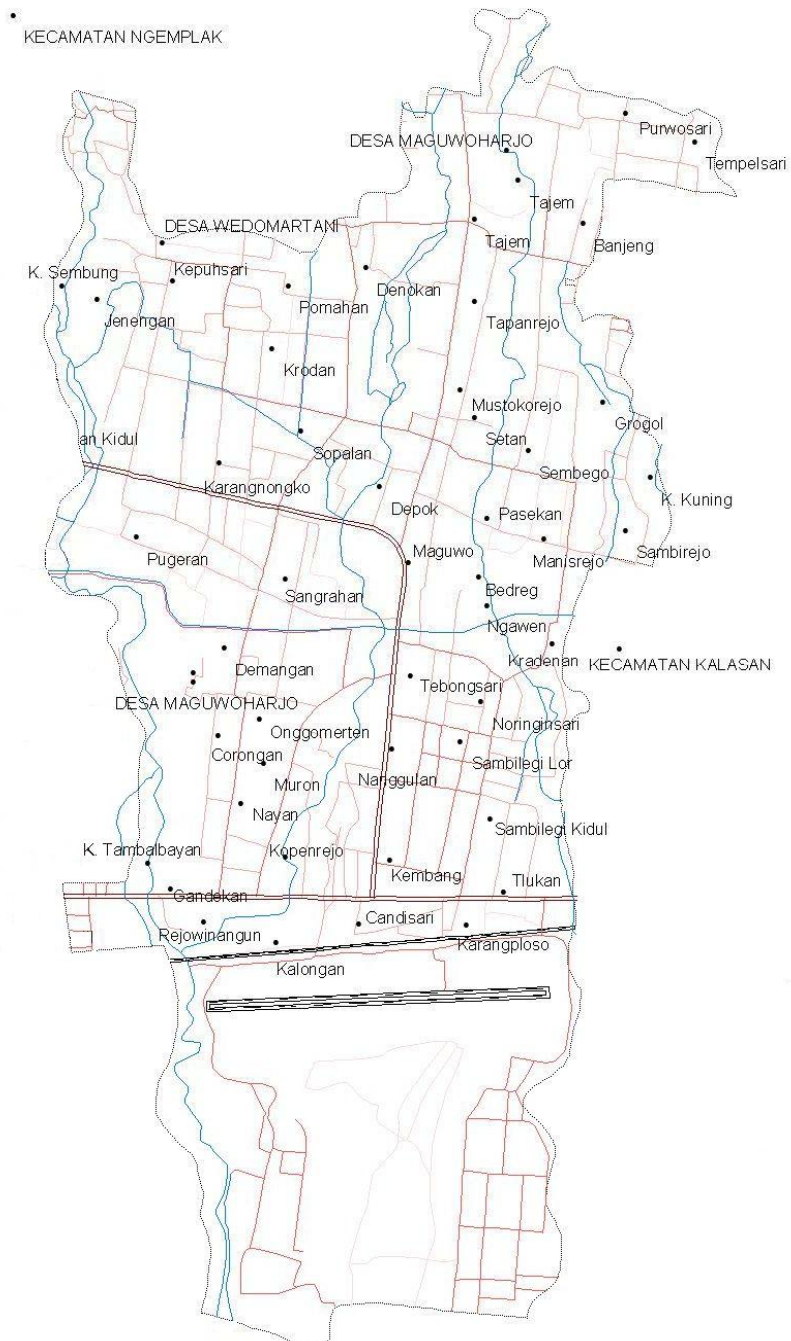
Setelah memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan serta hasil penelitian, maka berikut ini ada beberapa saran yang dapat dikemukakan dan semoga dapat bermanfaat bagi BUKP:

1. Peranan BUKP yang sudah ada ditingkatkan lagi seperti peranan dalam penyaluran dana, penghimpunan dana, konsultasi usaha, sehingga keberadaan BUKP dapat ditingkatkan kemanfaatannya bagi masyarakat desa Maguwoharjo.
2. Keterbatasan karyawan dalam memberikan pendampingan yang berupa konsultasi kewirausahaan agar segera dicarikan solusinya semisal dengan penambahan jumlah karyawan BUKP atau dengan cara bekerjasama dengan lembaga lain yang berkompeten dalam hal penyuluhan kewirausahaan (Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemkot, atau lembaga lain yang ingin mempromosikan usahanya).
3. Peningkatan sumber daya manusia pengurus dalam hal pengetahuan perbankan sehingga nantinya pelayanan terhadap nasabah dapat ditingkatkan.
4. Perlu adanya peningkatan penggalan dana terutama dari pihak ketiga yang berupa tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono. 2005. Islam, Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Al-Adalah*, Vol. 8(1): 15-18.
- Anas Sudiono. 1981. *Diktat Kuliah Metode Reserch dan Bimbingan Skripsi*. Yogyakarta: UD. Rama.
- Andree Bayo Ala. 1985. *Beberapa Pendekatan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Akademika.
- Andree Bayo Ala. 1985. *Beberapa Pendekatan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Akademika.
- Bambang Sudibyo dkk. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
- E. St. Harahap, dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Emil Salim, tt. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta: Yayasan Indayau.
- Heru Nugroho. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* dalam Awam Setya Dewantara (ed), *Kemiskinan, ketimpangan dan pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Heru Nugroho. 1995. *Kemiskinan Ketimpangan, dan Pemberdayaan* dalam Bambang Sudibyo, dkk., (ed), *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Lexy J. Maleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Lexy J. Maleong, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Kerta Karya.
- Muhammad Atha'.1982. *Sejarah Dakwah Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Musa Asy'ari. 1997. *Islam Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Lesfi.

- Parsudi Suparlan. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: YOI.
- Rahmat. 2006. Keprihatinan Akhir Tahun, *Radar Jogja*. 26 Desember.
- Robert Chamber. 1987. *Pembangunan Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharsini Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulthoni Nurifat. Jum'at 5 Januari 2007. Prospek Kebijakan Pemprov DIY dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, (Online), (<http://www.umy.ac.id/berita.php?id=496>, diakses 29 Mei 2007)
- Tadjuddin Noer Effendi. 1995. *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Yusuf Qardawi. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ziaddin Ahmad. 1998. *Al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*. Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa.



LEGENDA

- Sungai
- Jalan arteri
- Jalan kereta api
- Jalan kolektor
- Jalan lain
- Jalan lokal
- Jalan setapak
- Lapangan terbang perintis
- Batas



DAFTAR INTERVIEW GUIDE

A. Kepada Pengurus Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Kecamatan Depok

1. Bagaimana gambaran umum program yang dilaksanakan oleh BUKP?
2. Kapan berdirinya BUKP Kecamatan Depok?
3. Apa yang melatarbelakangi berdirinya BUKP Kecamatan Depok?
4. Siapa yang memprakarsai berdirinya BUKP Kecamatan Depok?
5. Bagaimana operasional BUKP Kecamatan Depok?
6. Bagaimana pelaksanaan Program BUKP Kecamatan Depok?
7. Bagaimana penyaluran dana bisa sampai kepada masyarakat?
8. Siapa yang berhak menerima dana pinjaman?
9. Apa kriteria untuk menjadi anggota BUKP Kecamatan Depok?
10. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pinjaman dana?
11. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program yang diadakan BUKP Kecamatan Depok?

B. Kepada Masyarakat Miskin Yang Tergabung Sebagai Anggota BUKP

Kecamatan Depok.

1. Bagaimanakah kegiatan kesehariannya?
2. Bagaimanakah latarbelakang pendidikan mereka?
3. Darimana mereka mengenal BUKP?
4. Bagaimanakah pendapat mereka mengenai BUKP?
5. Apa motivasi mereka menjadi anggota BUKP?
6. Sejauhmana keterlibatan anggota dalam memutuskan pinjaman dana?
7. Bagaimanakah prosedur pengembalian dana?
8. Bagaimanakah hasil yang diperoleh setelah menjalin kemitraan dengan BUKP?
9. Keuntungan apakah yang diperoleh setelah menjadi anggota BUKP?

CURRICULUM VITAE

Nama : Ade Zulkhan Suparman
TTL : Cilacap 7 Desember 1980
Agama : Islam
Hobi : Musik, olah raga
Status : Belum Menikah
T/BB : 160 cm/56 kg
Alamat asal : Cimanggu Kulon Rt 03/Rw 06 Cimanggu Cilacap
Jateng 53256
Alamat Yogyakarta : Jl. Nologaten Gg. Temugiring No. 56 Rt 02 Rw 04
Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta 55281
Tlp/Hp : 081804033586
Pendidikan formal : SD Negeri 2 Cimanggu, lulus 1993
SMP Negeri 1 Cimanggu, lulus 1996
SMU Negeri 1 Majenang, lulus 1999
D1 program Teknisi dan Informatika di EL RAHMA
Yogyakarta 2000
Motto : Sekali kaki melangkah ia langkah menuju Allah
Biar langit runtuh takkan goyah kaki melangkah
Biar bumi terbelah takkan pudar ukhuwah
Biar badai menghantam takkan lepas azzam digenggam
Nama Ayah : Solatun
Nama Ibu : Sumiyati
Alamat Orang Tua : Cimanggu Kulon Rt 03/Rw 06 Cimanggu Cilacap
Jateng 53256